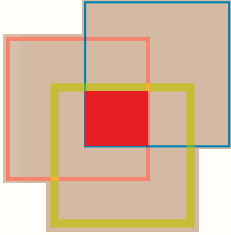




International
Labour
Organization

Program ILO di Indonesia: **Capaian 2015**



International
Labour
Organization

Program ILO di Indonesia: **Capaian 2015**

Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2016
Cetakan Pertama 2016

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: rights@ilo.org Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.iftro.org untuk mengetahui organisasi pemegang lisensi di negara anda.

Program ILO di Indonesia: Capaian 2015/Organisasi Perburuhan Internasional, Kantor Jakarta; ILO, 2016
68 p.

ISBN: 978-92-2-031036-6 (print)
978-92-2-831037-5 (web pdf)

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: *ILO Works in Indonesia: 2015 Results*; ISBN: 978-92-2-031036-6 (print); 978-92-2-131037-2 (web pdf)/Kantor Perburuhan Internasional - Jakarta: ILO, 2016

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di website ILO (www.ilo.org/jakarta) dalam format digital. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di jakarta@ilo.org.

Foto-foto: Koleksi Kantor ILO Jakarta

Editor: Gita F. Lingga

Dicetak di Indonesia

Kata Pengantar



Merupakan kebanggaan kami dapat menghadirkan laporan capaian tahunan keempat yang memaparkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Indonesia. Publikasi ini mencakup capaian-capaian di tahun 2015. Kami terdorong untuk terus melakukan prakarsa ini sejalan dengan berbagai komentar positif yang kami terima dari publikasi-publikasi sebelumnya.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Organisasi ini memiliki 187 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya mengingat struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Indonesia telah menjadi anggota ILO yang sangat aktif dan penting sejak tahun 1950.

Capaian-capaian tahun 2015 ini berdasarkan pada tiga prioritas utama Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia (2012-2015):

1. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan
2. Hubungan industrial yang harmonis dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif
3. Perlindungan sosial untuk semua

Kami saat ini sedang dalam proses mengidentifikasi prioritas-prioritas baru dan mengembangkan generasi ketiga Program Pekerjaan Layak Nasional, yang akan memberikan panduan yang koheren dan terpadu terhadap kegiatan-kegiatan ILO di Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Terbitan Program ILO tahun 2015 kali ini memaparkan beragam capaian di bawah program-program dan proyek-proyek ILO di Indonesia. Capaian-capaian tersebut meliputi, di antaranya, peningkatan dan perbaikan produktivitas bagi perusahaan-perusahaan kecil menengah, kepatuhan perusahaan terhadap standar-standar ketenagakerjaan, peluang kerja yang lebih setara bagi penyandang disabilitas, pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja, bantuan terhadap pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak vulkanik di Gunung Sinabung, perlindungan pekerja migran dan perluasan cakupan perlindungan sosial.

Capaian-capaian tahun 2015 ini pun merupakan hasil dari kemitraan erat dengan para konstituen tripartit kami. Kami terus menjalin kerjasama dengan mereka pada 2016.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kami atas dukungan yang kami terima dari berbagai mitra, yang tanpa mereka kami tidak akan mungkin mencapai hasil-hasil ini. Juga penghargaan kepada tim ILO di Indonesia, di regional dan kantor pusat atas kinerja dan dedikasi mereka.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan kami di Indonesia, saya mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami: www.ilo.org/jakarta.

Selamat membaca!



Francesco d'Ovidio
Direktur ILO di Indonesia

Pekerjaan Layak untuk Semua

Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak. Pekerjaan layak merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi masyarakat dalam kehidupan pekerjaan mereka. Ia melibatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga mereka.

Pekerjaan layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membutuhkan adanya kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua perempuan dan laki-laki. Pekerjaan layak pun merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Karenanya, penciptaan pekerjaan layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan.

Daftar Isi

	Kata Pengantar	3
	Daftar Isi	5
	Sekilas Indonesia	9
	A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan	12
	1. Kebijakan ketenagakerjaan	
	♦ Standar Ketenagakerjaan dalam Rantai Pasokan Global	13
	2. Ketenagakerjaan Muda	
	3. Pengoptimalan ketenagakerjaan dalam investasi masyarakat	
	♦ Memperkuat Program Infrastruktur Padat Karya untuk Kepentingan Masyarakat	15
	♦ Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur	20
	4. Pengembangan kewirausahaan dan bisnis	
	♦ Program Bantuan Pemulihan Gunung Sinabung (SIRESUP)	17
	♦ Program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)	24
	♦ Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN	28
	B. Hubungan industrial yang harmonis dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif	30
	♦ Memperkuat Pengawasan Ketenagakerjaan	31
	♦ Better Work Indonesia	34
	C. Perlindungan sosial untuk semua	38
	1. Jaminan Sosial Pekerja	39
	2. Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia)	42
	3. Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja	46
	4. PROMOTE: Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak	49
	6. Aksi Tripartit untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek ASEAN Triangle)	54
	Tema lintas sektor	58
	1. Kesetaraan Gender	
	♦ Akses terhadap Pekerjaan dan Pekerjaan Layak Bagi Perempuan (MAMPU)	59

Bagaimana ILO Bekerja

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 187 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Dalam mengundang pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program, ILO ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini didasari pada kebutuhan para perempuan dan laki-laki yang bekerja.

ILO bekerja berdasarkan pedoman dari Badan Pemimpin ILO (Governing Body), yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pekerja/buruh dan 14 wakil pengusaha. Mereka bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan anggaran, yang kemudian diserahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) untuk disetujui, serta memilih Direktur Jenderal.

ILC mengadakan pertemuan setiap tahun di Jenewa. Konferensi ini menyusun dan mengadopsi standar-standar ketenagakerjaan dan merupakan forum diskusi berbagai permasalahan sosial dan ketenagakerjaan. Setiap negara anggota, termasuk Indonesia, diwakili delegasi yang terdiri dari dua perwakilan pemerintah, masing-masing seorang perwakilan pekerja dan pengusaha, serta para penasihat teknis mereka. Mereka dapat memberikan pendapat dan melakukan pemungutan suara secara mandiri.

ILO di Indonesia: Prioritas dan Keluaran

Indonesia dan ILO telah menjalin kerjasama sejak Indonesia menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. Menerapkan struktur tripartit yang unik, ILO membangun kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan empat konfederasi serikat pekerja: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kongres Jakarta, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Berdasarkan prioritas-prioritas Pemerintah Indonesia, mandat ILO dan fokus para konstituen tripartit, tiga bidang prioritas telah ditetapkan untuk Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia (DWCP) 2012-2015. Indonesia saat ini sedang menyusun DWCP baru untuk lima tahun ke depan.

A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.

B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.

C. Jaminan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.

Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripatisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diarusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.



Sekilas Indonesia

POPULASI

256.000.307 orang
Perempuan: 49,75%
Laki-laki: 50,25%

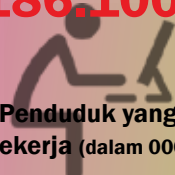
AREA

Total Area:
1.910.931,32 km²
Pulau: 17.504
Kepadatan: 132 orang/km²

PEMERINTAHAN

Provinsi: 34
Kabupaten: 416
Kota: 98

186.100


Penduduk yang
bekerja (dalam 000)

122.380


Penduduk aktif secara
ekonomi (dalam 000)

114.819


Total
ketenagakerjaan
(dalam 000)

7.560


Total pengangguran
(dalam 000)

Statistik Utama (2015)

65,76%


Tingkat partisipasi
angkatan kerja

61,7%


Rasio tenaga kerja
atas penduduk

8,5%


Tingkat setengah
pengangguran

6,18%


Tingkat pengangguran

34,2%


Tingkat ketidakaktifan

Kegiatan

PROYEK:



PROGRAM:



Didukung oleh:



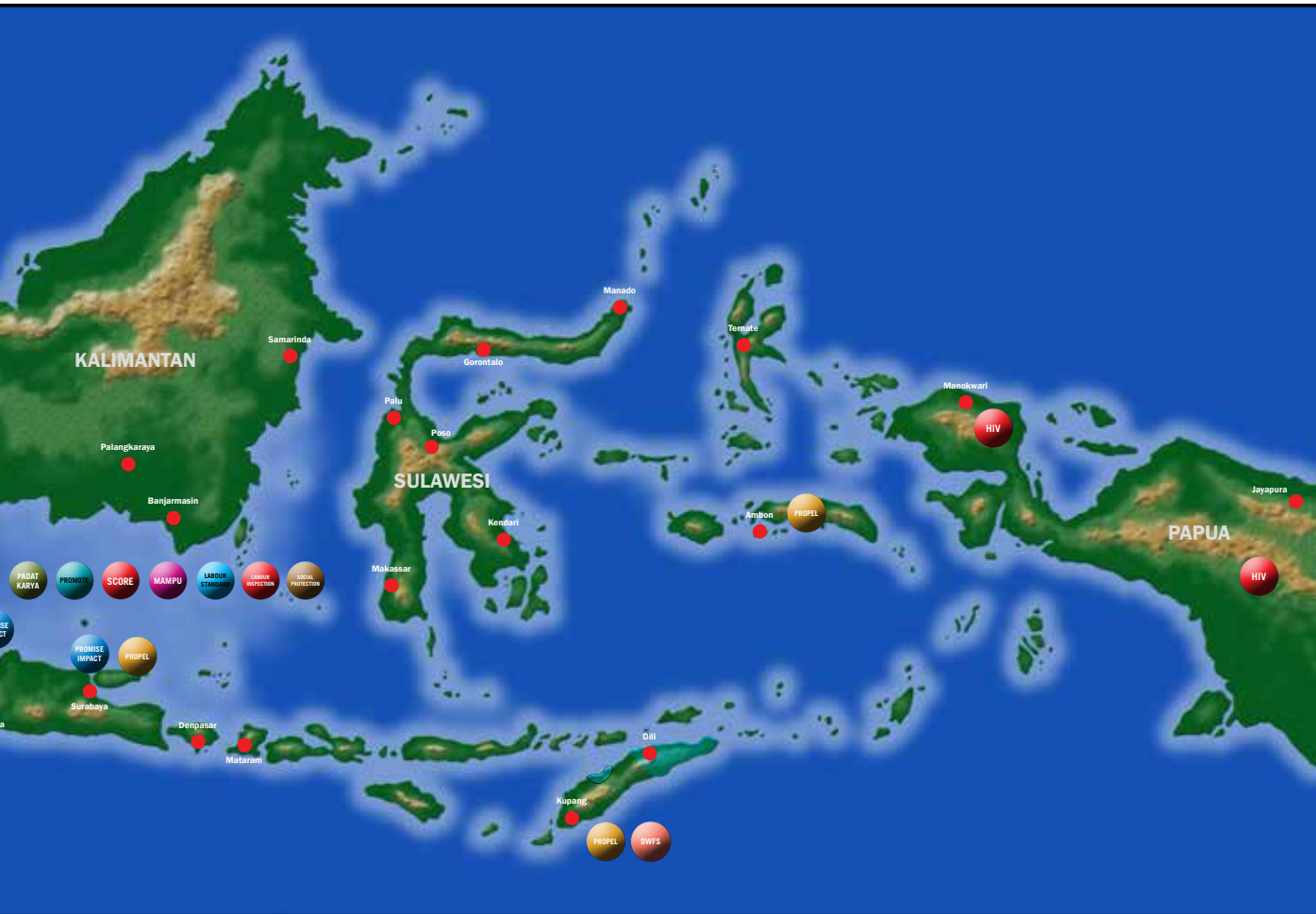
Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade



Norad



tan ILO di Indonesia



A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.



Standar Ketenagakerjaan dalam Rantai Pasokan Global

Didukung oleh:



Sekilas:

Proyek Standar Ketenagakerjaan dalam Rantai Pasokan Global bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan kondisi kerja dalam rantai pasokan garmen melalui penguatan mekanisme penetapan upah minimum dan kesepakatan bersama, promosi dialog sosial dengan meningkatkan akses pemangku kepentingan atas informasi, penguatan sistem guna memastikan penerapan standar-standar ketenagakerjaan di perusahaan dan peningkatan kapasitas konstituen tripartit.

Baru diterapkan selama enam bulan di Indonesia, Proyek ini secara efektif berhasil melakukan riset mengenai penetapan upah minimum dan praktik kesepakatan bersama serta kondisi kerja di industri-industri garmen, mengembangkan basis data mengenai upah, kesempatan kerja dan produktivitas serta memfasilitasi dialog di antara konstituen tripartit mengenai penetapan upah minimum dan kesepakatan bersama di tingkat nasional dan provinsi. Tahap kedua proyek ini dijadwalkan pada Maret 2016.

Capaian Tahun 2015:

1. **Pelaksanaan Dialog Ketenagakerjaan Indonesia mengenai Kebijakan Upah Minimum dan Upah:** Acara ini menyediakan sebuah forum untuk memprakarsai dialog di antara para konstituen tripartit dan para pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta perusahaan mengenai upah minimum dalam konteks kelembagaan, politik, sosial dan ekonomi. Perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan memaparkan rencana pemerintah memperkenalkan sebuah mekanisme penetapan upah minimum baru dengan menggunakan formula matematika untuk meningkatkan upah minimum tahunan.
2. **Penyelesaian Studi Kasus mengenai Proses Penetapan Upah Minimum di Indonesia:** Studi ini mendokumentasikan kemajuan proses penetapan upah minimum aktual di Indonesia, termasuk upah minimum dan penetapan upah melalui kesepakatan bersama. Studi ini juga menjelaskan proses kerangka hukum dan penerapannya di tingkat nasional hingga enam perusahaan di kabupaten/kota Bandung, Bekasi dan Sukabumi.
3. **Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Tinggi dengan konstituen tripartit:** Sebagai tindak lanjut dari dialog ketenagakerjaan mengenai kebijakan upah minimum dan upah, pertemuan tingkat tinggi dengan para pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan konfederasi-konfederasi serikat pekerja nasional diselenggarakan untuk berbagi standar-standar internasional yang relevan dan praktik-praktik terbaik sebagai pelajaran yang diperoleh serta rujukan potensial bagi reformasi kebijakan upah yang sedang berlangsung di Indonesia. Topik-topik utama yang didiskusikan meliputi: Mekanisme penetapan upah minimum di negara-negara lain, termasuk yang menggunakan formula matematika; promosi kesepakatan bersama termasuk kesepakatan multi-perusahaan; dan pengembangan serta aplikasi struktur dan skala upah.



Target Tahun 2016:

- Berkontribusi kepada pengembangan kebijakan upah nasional melalui konsultasi teknis dan lokakarya tripartit nasional.
- Mendorong penyusunan kerangka hukum dan peraturan untuk kesepakatan bersama yang lebih efektif, termasuk kesepakatan multi-perusahaan.
- Meningkatkan kapasitas para konstituen tripartit dalam kesepakatan bersama berbasis bukti dan kesepakatan multi-perusahaan di provinsi-provinsi percontohan.

Memperkuat Program Infrastruktur Padat Karya untuk Kepentingan Masyarakat

Didukung oleh:



Sekilas:

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki mandat untuk mempromosikan perluasan pekerjaan dan pengembangan sektor perekonomian informal melalui program-program pasar kerja aktif yang mampu mempromosikan pengembangan mata pencarian. Untuk melaksanakan mandat ini, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan sejumlah program nasional, termasuk program Padat Karya nasional.

Program-program ini bertujuan menciptakan dan memperluas akses atas peluang kerja melalui investasi aset dan keterampilan yang mendukung pembangunan ekonomi di desa. Tujuan langsung dari program-program ini adalah memberdayakan pekerja dan masyarakat setempat melalui penciptaan lingkungan yang mendukung, sementara tujuan yang lebih tinggi adalah mempromosikan perluasan kerja dan pengembangan usaha. Dengan pelaksanaan program ini di lebih dari 300 kabupaten/kotamadya, program-program ini menjadi bagian penting dari strategi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Kementerian Tenaga Kerja menerapkan pendekatan berbasis sumber daya lokal (LRB) ILO sebagai bagian dari Program Infrastruktur Padat Karya guna membantu peningkatan kualitas aset dan pekerjaan yang dihasilkan. Adopsi ini berdasarkan proyek-proyek ILO dari tahun 2006 hingga saat ini yang menerapkan pendekatan LRB dalam pemulihan bencana dan mitigasi perubahan iklim.

Program bersama ini berakhir pada Desember 2015.

Capaian Tahun 2015:

Capaian Umum:

1. **Pembangunan enam jembatan gantung:** Jembatan gantung sepanjang 45,5 meter di Lebak, Banten; 57,4 meter di Bone, Sulawesi Selatan; 57,4 meter di Gorontalo; sebanyak tiga jembatan masing-masing sepanjang 45,5 meter di Jombang dan Nganjuk di Jawa Timur dan Bantul, Yogyakarta.
2. **Pembangunan empat jembatan:** Jembatan sepanjang 52,5 meter di Pekalongan, Jawa Tengah; 57,4 meter di Bone Bolango, Gorontalo; 57,4 meter di Pandenglang, Banten dan 62,5 meter di Wonosobo, Jawa Tengah.
3. **Pengembangan program percontohan pekerjaan umum di daerah perkotaan** di 17 kabupaten di 14 provinsi yang menciptakan lapangan kerja bagi 1.716 pekerja dan sebanyak 17.160 hari kerja.
4. **Pembangunan jalan perdesaan di 17 kabupaten di enam provinsi** dengan panjang keseluruhan 14.186 meter. Kegiatan-kegiatan ini menciptakan pekerjaan bagi 1.496 pekerja dan menghasilkan 29.920 hari kerja.
5. **Peningkatan kapasitas lokal dengan mengembangkan keterampilan pengawas jembatan.**
6. **Penguatan kapasitas untuk pemantauan dan evaluasi** dengan memperkenalkan metodologi evaluasi dampak dan melatih enumerator mengenai metodologi ini.
7. **Pelatihan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan petugas Infrastruktur Padat Karya** sebagai pelatih utama untuk pemeliharaan jembatan berbasis masyarakat.
8. **Pelatihan bagi anggota masyarakat mengenai pemeliharaan jembatan berbasis masyarakat.**



Program Bantuan Pemulihan Gunung Sinabung (SIRESUP)

Didukung oleh:



Sekilas:

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, meletus pada 29 Agustus 2010 yang mengakibatkan 12.000 orang harus mengungsi. Segera setelahnya, kegiatan vulkanik menurun dan kemudian kembali meningkat pada September 2013, menyebabkan 15.000 orang harus mengungsi. Sejak itu, kegiatan vulkanik turun ke Waspada Tingkat 2 pada akhir September 2013. Pada Oktober 2013, kegiatan vulkanik kembali meningkat menjadi Siaga Tingkat 3 pada 3 November 2013.

Menanggapi krisis tersebut, pemerintah daerah menyatakan keadaan darurat. Mengamati gunung berapi tersebut menjadi semakin aktif, statusnya pun meningkat menjadi Awas Tingkat 4 pada 24 November, dan keadaan darurat diperpanjang hingga 7 Desember 2013. Hingga saat ini, Gunung Sinabung masih terus mengalami aktivitas vulkanik yang tinggi.

Untuk menanggapi situasi ini, ILO bersama dengan UNDP dan FAO membantu Pemerintah Indonesia melalui sebuah proyek bersama yang berjudul: "Program Bantuan Pemulihan Sinabung (SIRESUP)". Proyek ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada upaya pemulihan pasca bencana di daerah-daerah yang terkena dampaknya. Hasil dari Proyek ini adalah komunitas-komunitas yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung 2013-2014 kembali pulih dengan mata pencaharian yang berkelanjutan dan ketangguhan yang lebih tinggi.

Capaian Tahun 2015:

1. **Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan aktor-aktor sosial di bidang pembangunan ekonomi** melalui Pelatihan untuk Pelatih mengenai Pendidikan Keuangan dan Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para aktor lokal untuk memiliki kapasitas siap sedia dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait dengan pemberdayaan ekonomi, khususnya kewirausahaan dan kesadaran keuangan.
2. **Penyelesaian pelatihan komunitas yang disebut Pelatihan untuk Klien mengenai Pendidikan Keuangan bagi 100 keluarga terpilih dari tujuh desa relokasi**, bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai manajemen keuangan yang lebih baik, menetapkan tujuan keuangan keluarga, dan mempertimbangkan peluang bisnis/mata pencaharian keluarga. Pelatihan ini juga membantu meningkatkan kemampuan keluarga-keluarga yang terkena dampak sebelum menerima bantuan dana dalam jumlah besar dari program aksi pasca bencana pemerintah yang disebut RENAKSI.
3. **Penyelesaian kegiatan bantuan komunitas mengenai Pendidikan Keuangan untuk Keluarga** sebagai bagian dari dukungan pasca pelatihan kepada para peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan untuk Klien. Kegiatan ini bertujuan membantu para peserta dalam menerapkan hasil-hasil dari pelatihan mengenai Pendidikan Keuangan untuk Keluarga.
4. **Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan dengan menggunakan modul GET Ahead ILO** terhadap 80 peserta (33 laki-laki dan 47 perempuan) dari daerah-daerah yang terkena dampak. Pelatihan ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Industri dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Karo yang memberikan dana bantuan kepada 68 peserta untuk memulai usaha mereka.
5. **Fasilitasi bagi staf-staf terpilih dari Dinas Koperasi, Industri dan UKM Kabupaten Karo untuk berpartisipasi dalam Pelatihan untuk Pelatih tentang Mengelola Koperasi Pertanian Anda - My.Coop.** Pelatihan tersebut merupakan program pembelajaran jarak jauh dari Pusat Pelatihan Internasional ILO (ITC) Turin, yang bertujuan meningkatkan kapasitas badan pemerintah daerah agar memastikan keberlanjutan di masa mendatang.
6. **Pelaksanaan analisis rantai nilai terhadap komoditas-komoditas terpilih yang paling sesuai dengan situasi daerah dan alam di Sinabung**, sebagai sebuah kegiatan bersama dengan FAO. Analisis ini ditujukan untuk menentukan strategi-strategi pemulihan mata pencaharian yang efektif, yang berdasarkan pada potensi-potensi daerah dan potensi sosial setempat sebagai basis untuk intervensi proyek di masa mendatang.

Target Tahun 2016:

- Melaksanakan Kajian Kebutuhan Pelatihan Kejuruan berdasarkan hasil analisis rantai nilai untuk merancang sebuah program pelatihan terperinci guna membantu pemulihan mata pencaharian lebih lanjut, termasuk pelatihan keterampilan yang berbasis pada orientasi pasar dan durasi proyek.
- Menjalinkan kerjasama dengan penyedia/lembaga layanan pelatihan lokal untuk melakukan pelatihan kejuruan/keterampilan bagi kelompok komunitas terpilih dari daerah-daerah yang terkena dampak.
- Memberikan dukungan pasca pelatihan bagi peserta/kelompok yang telah menyelesaikan pelatihan kejuruan/keterampilan.
- Memfasilitasi pembentukan koperasi lokal di wilayah relokasi atau penguatan penyedia layanan keuangan mikro setempat guna menyediakan lingkungan yang mendukung bagi usaha mikro yang baru dimulai di wilayah relokasi baru.
- Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keuangan termasuk koperasi dan bantuan teknis untuk mendorong akses atas kredit dan layanan non-keuangan (seperti pendidikan keuangan/pendidikan bisnis) antara lembaga keuangan mikro dan penerima manfaat UKM.

Bangkit dari bencana sebagai perempuan pengusaha



DI WARUNG kecilnya, Susiyanti Br Sembiring sibuk menyeduh kopi hitam panas bagi para pelanggannya. Berlokasi di penampungan untuk pengungsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, warung kecilnya juga menyediakan kebutuhan sehari-hari, minuman dan sayur-sayuran. Dari warungnya, ia

sekarang dapat membantu keluarganya dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Ia bahkan dapat menyisihkan sejumlah uang untuk ditabung. Sekarang Susiyanti memiliki rekening tabungan di Koperasi Kredit Sondang Nauli dengan jumlah tabungan wajib tiap bulan minimal Rp. 30,000. "Saya bahkan dapat menabung untuk pendidikan ketiga anak saya. Setiap bulannya, saya juga menabung Rp. 300,000 untuk membantu pendidikan mereka di masa mendatang," ia berkata dengan bangga.

Susiyanti merupakan salah seorang dari 15.000 orang di Kabupaten Karo yang harus meninggalkan desanya karena letusan Gunung Sinabung pada 2013. Hingga saat ini, Gunung Sinabung terus mengalami aktivitas vulkanik yang tinggi. "Letusan telah menghancurkan seluruh desa saya, Desa Gurukinayan. Saya kehilangan usaha dan lahan pertanian seluas 8 hektar yang menjadi sumber utama penghasilan keluarga," ujarnya, mengingat hari di mana ia dan keluarganya harus meninggalkan desa mereka.

Letusan tersebut menyebabkan keluarganya harus tinggal di tenda pengungsi di Kabanjahe, ibukota Kabupaten Karo. Selama di tenda pengungsian, Susiyanti bekerja sebagai pekerja kebun untuk membantu keluarga dan suaminya juga bekerja sebagai supir angkutan umum daerah. Sebagai pekerja kebun, ia dibayar Rp. 60,000 per hari, namun ia tidak bekerja setiap hari dan hanya bekerja apabila diminta.

Ketika mengetahui keberadaan program ILO pada 2015 guna membantu komunitas-komunitas setempat seperti dirinya memperoleh kembali mata pencaharian mereka, ia langsung mendaftarkan diri untuk bergabung dengan pelatihan ILO mengenai Pendidikan Keuangan dan Kewirausahaan dengan menggunakan modul GET Ahead. "Sekarang saya tahu bagaimana melakukan pencatatan keuangan, menentukan prioritas pengeluaran dan berhati-hati dalam membelanjakan uang, khususnya dalam kondisi sulit seperti ini," ujarnya.

“Letusan ini telah membuat saya kehilangan usaha dan lahan; namun juga telah memberikan peluang untuk belajar mengenai bisnis dan keuangan dan membuat saya menjadi seorang wirausaha yang lebih baik”

Susiyanti Br Sembiring

Pada Juli 2015, keluarga Susiyanti menerima bantuan pemerintah untuk perumahan dan penyewaan lahan pertanian dengan jumlah total Rp. 3,800,000. Setelah menerima bantuan tersebut, ia pindah ke penampungan sementara yang disediakan oleh LSM lokal bernama Jenggala dalam radius 6 km dari Gunung Sinabung dan dekat dengan Desa Gurukinayan.

Berdasarkan apa yang ia pelajari dari pelatihan keuangan, ia menggunakan dana tersebut tidak hanya untuk menyewa lahan pertanian, namun juga memulai usaha kecilnya (warung kecil) di daerah penampungan. Sekarang ia mampu

menghitung laba dari pengeluarannya tiap minggu/bulan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya.

"Sebelumnya, saya hanya bisa membeli dan menjual. Saya tidak tahu persis seberapa besar keuntungan saya. Namun, sekarang dari tiap pengeluaran tiap minggu atau bulannya, saya tahu persis berapa banyak yang saya peroleh dari tiap barang yang terjual," katanya.

Sejak memulai warung kecilnya, ia menerima keuntungan harian sekitar Rp. 150,000. Ia juga merasa lebih yakin akan masa depannya, terutama untuk keluarga dan ketiga anaknya. "Letusan ini telah membuat saya kehilangan usaha dan lahan; namun juga telah memberikan peluang untuk belajar mengenai bisnis dan keuangan dan membuat saya menjadi seorang wirausaha yang lebih baik," ia berkata, seraya tersenyum. ❖

Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur

Didukung oleh:



Sekilas:

Saat ini hampir satu miliar penduduk dunia mengalami kelaparan kronis. Di saat yang sama kenaikan harga pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya memperburuk masalah kelaparan, kemiskinan, pengangguran, keresahan sosial dan ketidakstabilan politik. Untuk mengatasi persoalan ini, program ILO, "Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan", bertujuan untuk mempromosikan ketahanan pangan melalui sistem pangan yang lebih baik dengan memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan layak yang didukung hak-hak di tempat kerja, perlindungan sosial dan dialog sosial. Pekerjaan layak dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi dan pengolahan pangan, meningkatkan akses serta menyediakan penghasilan agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dan menjamin ketersediaan pangan mereka.

Di Indonesia, proyek ini berupaya mempromosikan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan bagi masyarakat desa di kabupaten-kabupaten yang paling rentan dan tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan kesempatan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan layak, serta memperluas kesempatan wirausaha dalam rantai nilai tanaman pangan yang penting—terutama jagung, rumput laut dan hewan ternak—yang memiliki potensi pekerjaan dan penghasilan yang tinggi.

Capaian Tahun 2015:

1. **Penyelesaian kajian partisipatif terhadap rantai nilai untuk ketiga komoditas yang dipilih (sektor rumput laut, jagung, dan ternak) di Kabupaten Kupang dan Sumba Timur.** Kajian ini melibatkan petani, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah daerah dan sektor swasta baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Hasil-hasil penilaian ini dianggap sebagai masukan yang berharga bagi lembaga pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan sektor yang lebih komprehensif.
2. **Peningkatan kapasitas forum pembangunan ekonomi di tingkat provinsi sebagai sarana untuk mendukung pembentukan forum pembangunan ekonomi daerah.** Dukungan lain yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas para anggota forum untuk mengembangkan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan pengembangan sektor-sektor kunci di NTT dan memfasilitasi dialog antara pelaku ekonomi.
3. **Penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, ILO dan FAO tentang Program Kerja Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan (DW4FS-SRD) di Provinsi NTT.** Inisiatif kemitraan akan menjadi tonggak penting dalam kemitraan global multidimensi untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi petani dan untuk meningkatkan pendapatan pedesaan di NTT dalam rantai nilai agro-makanan utama - terutama untuk jagung, rumput laut dan hewan ternak.
4. **Pelaksanaan Kampanye peningkatan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di bidang pertanian.** Kampanye ini dilakukan melalui pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatih bagi para staf pemerintah dan petani yang akan bertindak sebagai fasilitator dalam upaya peningkatan kerja. Hasil kampanye ini telah di replikasi oleh Departemen Ketenagakerjaan di Lampung dan telah diujicoba di dua desa.
5. **Penguatan lembaga-lembaga sebagai Penyedia Jasa Pengembangan Usaha (BDSP).** Lembaga-lembaga ini akan menggunakan modul pelatihan ILO yang dimodifikasi, termasuk GET Ahead, Pendidikan Keuangan untuk Keluarga, dan Pengembangan Usaha Berbasis Masyarakat (C-BED).
6. **Pelaksanaan serangkaian pendidikan kewirausahaan dan keuangan bagi 600 petani kecil** (25 persen merupakan peserta muda) menggunakan modul pelatihan ILO seperti GET Ahead dan Pendidikan Keuangan serta C-BED di 13 desa di Kabupaten Kupang. Sebagai dukungan pasca pelatihan, dilakukan kegiatan inisiasi pasar dibantu oleh tiga organisasi lokal yang bertindak sebagai BDSP. Tujuannya adalah meningkatkan akses atas pasar dan mendapatkan informasi harga, kemampuan menjual serta pilihan pasar yang lebih baik.
7. **Pelatihan bagi 50 kelompok perempuan (kelompok mewarnai tenunan secara alami) di dua kabupaten.** Pelatihan dilakukan oleh BDSP lokal dengan menggunakan modul kewirausahaan ILO dan anggaran mereka sendiri.
8. **Pelatihan bagi 40 siswa tentang cara memulai usaha yang ramah lingkungan, khususnya sampah organik dan bisnis daur ulang.** Pelatihan dilakukan oleh BDSP lokal dengan menggunakan modul kewirausahaan ILO dan anggaran mereka sendiri.
9. **Keberlanjutan melalui kepemilikan program, berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.** Untuk saat ini, Dinas Koperasi provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatih mengenai Usaha Ramah Lingkungan dan Memulai serta Meningkatkan Usaha Anda (Green SIYB) dengan mempergunakan modul ILO untuk pengembangan kewirausahaan di seluruh 21 kabupaten di NTT.

Target Tahun 2016:

- Melakukan konsolidasi untuk berbagai perangkat ILO dalam pembangunan pedesaan sebagai paket praktis bagi kepala desa dan pembuat kebijakan lokal dalam merancang pekerjaan yang layak dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
- Memperluas dukungan kepada desa-desa sasaran agar dapat direplikasi di kabupaten sasaran lain, seperti Sumba Timur, Timor Tengah Selatan (TTS) dan Belu, melalui kerjasama dengan program pembangunan pedesaan pemerintah, seperti Program Anggur Merah* dan program dana pedesaan.
- Mendukung Pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan komprehensif guna mempromosikan pekerjaan yang layak, pertumbuhan yang inklusif dan ketahanan pangan.

Note:

* Anggur merah adalah singkatan untuk "Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera", sebuah program provinsi di mana pemerintah provinsi menyediakan Rp. 250.000.000 untuk kegiatan pembangunan ekonomi desa yang dikelola oleh pemerintah desa.



'Kerja layak,

PULAU SEMAU dianggap sebagai salah satu daerah rawan pangan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan kajian pemerintah mengenai ketahanan pangan dan kerentanan yang dirilis pada 2010. Guna membantu pulau ini mengatasi kerawanan pangan, ILO melalui Proyek Pekerjaan yang Layak untuk Ketahanan Pangan memfasilitasi pelatihan teknis budidaya rumput laut yang terpadu dengan serangkaian pelatihan untuk mempromosikan dan mengembangkan kewirausahaan dengan menggunakan modul pelatihan ILO: GET Ahead dan Usaha Pembangunan Berbasis Masyarakat/C-BED dan Pendidikan Keuangan.

Dukungan yang diberikan melalui program-program pelatihan membantu para petani mengelola bisnis mereka dengan baik dan efektif. Alhasil, sejumlah peserta di desa Onansila di Semau Selatan memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok yang diberi nama 'Dari Dulu', yang terdiri dari 23 petani (12 laki-laki dan 11 perempuan).

"Secara perorangan kami hanya dapat menggarap 10 ikat rumput laut, dan paling banyak 25 ikat. Karena penggarapan rumput laut membutuhkan banyak proses mulai dari mempersiapkan bahan-bahan penanaman, perawatan, pra- dan pasca-panen serta transportasi, yang kesemuanya membutuhkan banyak upaya bila dilakukan secara perorangan. Itu pun belum termasuk risiko pencurian akibat kurangnya pengawasan," kata Halens, ketua kelompok Dari Dulu.

Bekerja dalam kelompok masih tergolong hal baru bagi petani dalam konteks budidaya rumput laut. Namun, mereka bersemangat untuk mencobanya. Sekitar 32 ikat rumput laut dibudidayakan dalam percobaan kelompok pertama. Selama proses itu, anggota kelompok menyadari mereka bekerja lebih cepat.



bukan kerja berat'



Rata-rata, bekerja dalam kelompok lebih cepat hingga 200 persen dibanding saat melakukan tugas-tugas secara individual.

Mereka pun belajar untuk melakukan tugas-tugas mereka secara lebih efektif. Sebelumnya, para petani menempatkan ikatan mereka di mana saja. Namun, di bawah kelompok, mereka memilih tempat yang lebih mudah untuk diawasi bersama. Sebelumnya, dibutuhkan lebih dari dua minggu untuk mengeringkan rumput laut karena hanya ditinggalkan mengering di atas pasir. Kini, hanya diperlukan satu minggu karena rumput laut dikeringkan dalam struktur pengeringan gantung yang menjamin kebersihan dan kelembaban kandungan, serta meminimalkan kerugian produk karena pengeringan berlebihan.

pelatihan teknis budidaya rumput laut yang terpadu dengan serangkaian pelatihan untuk mempromosikan dan mengembangkan kewirausahaan bagi petani yang terpilih di daerah dengan menggunakan modul pelatihan ILO: GET Ahead dan Usaha Pembangunan Berbasis Masyarakat/C-BED dan Pendidikan Keuangan

Dalam hal pengelolaan usaha, kelompok ini sekarang mampu mengembangkan rencana bisnis, keterampilan pembukuan, perhitungan biaya dan proyeksi hasil. Saat ini, kelompok tersebut memutuskan untuk memperluas usaha dengan membudidayakan 75 ikat untuk produksi kedua. Biaya produksi digunakan sebagai salah satu unsur dalam penawaran harga dengan pedagang di desa. Selain itu, kelompok tersebut kini telah bereksperimen dengan sistem pemasaran kolektif agar dapat mengakses pasar yang lebih luas atau pedagang alternatif, sebagai upaya mencari harga yang lebih baik.

Saat bekerja dalam kelompok, para petani masih mengelola budidaya rumput laut mereka sendiri sebagai sumber pendapatan utama. Mereka menerapkan sistem yang sama dengan yang digunakan dalam kelompok. Hasil yang diperoleh dari berkelompok telah meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis masing-masing. Beberapa anggota, misalnya, kini berencana menyimpan uang mereka untuk memperluas usaha dengan menambahkan lebih banyak ikat atau membeli perahu kecil, merehabilitasi rumah dan memenuhi kebutuhan sosial seperti pernikahan dan pemakaman, bukan menghabiskan uang dengan cara yang tidak produktif seperti dulu.

Melalui proses ini, Halens dengan bangga mengatakan, "Kerja yang layak, bukan kerja berat. Itulah yang kita ketahui sekarang, dan bekerja dalam kelompok membuatnya praktis." ILO telah mampu mendukung lebih dari 110 petani rumput laut di Semau Selatan dalam meningkatkan bisnis rumput laut mereka saat ini. ❖

Program Kesiambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)

Didukung oleh:



Sekilas:

Diluncurkan pada Juli 2010, program SCORE Indonesia dirancang untuk membantu usaha kecil-menengah (UKM) di Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki kondisi kerja, mengurangi jejak (karbon) lingkungan dan mempererat kerjasama serta komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Program ini membantu perusahaan agar lebih berdaya saing di pasar global sehingga menciptakan lapangan kerja.

Didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan Badan Kerjasama Pembangunan Nowergia (NORAD), program SCORE ini didukung dan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), konfederasi serikat pekerja nasional dan Yayasan Dharma Bhakti Astra. Indonesia terpilih sebagai satu dari tujuh negara bersama dengan India, Cina, Afrika Selatan, Ghana, Vietnam, dan Kolombia untuk menerapkan program SCORE.

www.scoreindonesia.net



SCORE.Indonesia



@SCORE_Indonesia

Capaian Tahun 2015:

1. **Pemuatan metodologi SCORE dalam Kurikulum Dasar Pelatih Produktivitas Baru Indonesia** di bawah Pusat Pelatihan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2013. Kementerian Ketenagakerjaan mendanai semua anggaran pelatihan dan para pesertanya adalah pelatih produktivitas di seluruh Indonesia.
2. **Finalisasi dan ujicoba pelaksanaan Pelatihan Singkat SCORE.** Versi singkat SCORE Global telah diadaptasi agar sejalan dengan SCORE Indonesia dan telah dilaksanakan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali. Pelatihan singkat ini telah membawa perubahan dan dampak positif pada kerjasama di tempat kerja, komunikasi, pengendalian kualitas dan proses alur produksi di setiap usaha kecil dan menengah (UKM) yang turut serta.
3. **Komitmen Pemerintah Jawa Tengah untuk mendanai kegiatan SCORE di Jawa Tengah.**
4. **Pendanaan dari Kementerian Luar Negeri untuk kegiatan pelatihan SCORE di Bali,** dan Kementerian juga berkomitmen untuk mendanai kegiatan pelatihan SCORE dengan penyedia layanan teknis bernama Bali Export Development Organization (BEDO) di Yogyakarta pada tahun 2016.
5. **Komitmen Yayasan Sampoerna untuk menyediakan dana sebesar USD 25,000 bagi kegiatan pelatihan SCORE di Jawa Timur.** Pelatihan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan penyedia layanan teknis, BEDO, yang bertindak sebagai fasilitator bagi 24 UKM di dalam rantai nilainya.
6. **Pengembangan Program Pembinaan Perhotelan (Hospitality Coaching/Ho-Co Programme) dalam sektor pariwisata:** terinspirasi metodologi SCORE, Swiss Contact mengadaptasi metodologi SCORE untuk modul-modul pariwisata yang didasarkan kepada layanan perhotelan mikro Indonesia. Program ini dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
7. **Penguatan kapasitas empat konfederasi serikat pekerja** melalui Pelatihan untuk Pelatih Singkat dan dan Pelatihan untuk Usaha SCORE secara intensif. Pelatihan-pelatihan ini didasarkan kepada UKM yang juga merupakan anggota serikat pekerja sebagai upaya melembagakan metodologi SCORE di Indonesia.
8. **Pemberian penghargaan Parama Karya kepada lima UKM yang berpartisipasi dalam SCORE:** UD Kreasi Lutvi dari Sumatera Utara, UD Pelangi Indonesia dari Jawa Timur, PT Mega Global Food Industri dari Jawa Timur, PT Lambang Jaya dari Lampung dan CV Batik 16 dari Semarang. Penghargaan ini merupakan penghargaan terhadap capaian produktivitas tertinggi dari Pemerintah Indonesia.
9. **Sistem basis data Pemantauan dan Evaluasi SCORE** (dibangun tahun 2012), menyajikan hasil keseluruhan **127 perusahaan yang terdaftar sebagai usaha yang berpartisipasi dalam SCORE Indonesia, 60 instruktur aktif; 303 manajer (38 persen) dan 492 pekerja (62 persen) dilatih. Sekitar 38 persen dari total manajer dan pekerja adalah perempuan** (data Feb 2015).



Target Tahun 2016:

- Mendukung program perbaikan produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
- Melakukan Sertifikasi Global SCORE untuk para pelatih SCORE Indonesia terpilih.
- Membangun Pusat Nasional SCORE Indonesia.
- Menyelenggarakan Konferensi Produktivitas SCORE Indonesia.
- Menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih dan Pelatihan untuk Usaha SCORE secara intensif dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
- Memprakarsai dan memperluas kerjasama antara SCORE Indonesia dengan kementerian lainnya serta pemangku kepentingan terkait dengan produktivitas.



PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan Parama Karya 2015 kepada lima usaha kecil dan menengah (UKM) yang berpartisipasi dalam SCORE: UD Kreasi Lutvi dari Sumatera Utara, UD Pelangi Indonesia dari Jawa Timur, PT Mega Global Food Industri dari Jawa Timur, PT Lambang Jaya dari Lampung dan CV Batik 16 dari Semarang. Penghargaan Parama Karya merupakan penghargaan produktivitas tertinggi bagi UKM dari Pemerintah Indonesia. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan di Istana Negara pada 24 November 2015, dan diberikan kepada sebanyak 22 UKM.

SCORE, juga dikenal sebagai program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE), dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM. Diluncurkan di Indonesia pada 2010 dan awalnya diprakarsai oleh ILO, program ini telah menjadi sebuah program tripartit, yang diterapkan bersama oleh pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan meningkatkan daya saing dan produktivitas mereka. "Saat ini merupakan era kompetisi. Perusahaan yang tidak memiliki daya saing tidak akan dapat bertahan. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kompetisi tidak lagi terjadi antara perorangan, kota atau provinsi, namun antara negara," ia berkata.

Untuk diakui sebagai penerima penghargaan, UKM terpilih melalui berbagai penilaian dasar. Mereka dinilai oleh auditor independen dan juri yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi dan Dewan Produktivitas Nasional berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: kepemimpinan, perencanaan strategis, orientasi pada pelanggan dan ekspansi pasar, sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi organisasi, kelengkapan data, informasi dan analisis, proses manajemen serta hasil bisnis.

"Penghargaan Parama Karya merupakan simbol pengakuan terhadap UKM yang telah berhasil menerapkan konsep kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dan produktivitas meningkatkan nilai tambah, yang pada gilirannya meningkatkan perluasan bisnis, peluang kerja dan kesejahteraan pekerja. Ini pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional," ujar Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri.

Lima perusahaan SCORE dianugerahi Penghargaan Parama Karya 2015 oleh Presiden Joko Widodo

© Setneg RI



“Saat ini merupakan era kompetisi. Perusahaan yang tidak memiliki daya saing, tidak akan dapat bertahan... kompetisi tidak lagi terjadi di antara perorangan, kota atau provinsi, namun di antara negara”

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

melalui kunjungan ke lokasi. “Kami terus membuat program SCORE sebagai budaya kerja kami,” Suryanti menambahkan.

Noor Suryanti, pemilik dan direktur UD Pelangi Indonesia, sebuah perusahaan kerajinan tangan berskala kecil di Jawa Timur, mengakui bahwa program SCORE telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktivitas perusahaannya dan memungkinkan perusahaannya dianugerahi penghargaan Parama Karya. “Setelah menerapkan program SCORE, lingkungan kerja telah berubah. Para karyawan lebih termotivasi, dan kami memiliki sistem komunikasi yang lebih baik yang telah meningkatkan kinerja, memperkuat kerjasama dan memperbaiki pembagiantugas,” ujarnya.

UD Pelangi Indonesia mulai melaksanakan program SCORE pada 2015 di bawah panduan instruktur produktivitas dari Pusat Produktivitas Provinsi di Jawa Timur. Selain pelatihan di ruang kelas, para pelatih juga secara langsung membantu UD Pelangi Indonesia

Senada, Karlonta Simarmata, instruktur SCORE di Lampung, berbagi pengalamannya dalam membantu PT Lambang Jaya. “Saya telah menyaksikan perubahan riil yang memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan. Setelah penerapan program SCORE, lingkungan kerja sekarang menjadi bersih, rapi dan tertata. Sanitasi dan kebersihan meningkat serta ada fasilitas tambahan seperti air minum untuk pekerja.”

Selain itu, program SCORE juga telah membuka peluang jejaring bisnis di antara UKM yang berpartisipasi. Contohnya, pembentukan jejaring bisnis antara UD Pelangi Indonesia dan PT Mega Global Food Industry. UD Pelangi Indonesia mengunjungi PT Mega Global untuk mempelajari praktik-praktik terbaik dan bagaimana meningkatkan usaha. ❖

Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN

Didukung oleh:



Pangsa usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) di Asia Tenggara mencapai lebih dari 90 persen jumlah perusahaan domestik dan menyerap 75-90 persen tenaga kerja non-pertanian. UMKM menyediakan basis pasokan yang mendukung keberhasilan dan produktivitas perusahaan

Sekilas:

internasional skala besar. Karenanya UMKM merupakan pondasi penting bagi pengoperasian mereka. Sebagian besar lapangan kerja yang diciptakan di negara-negara Asia Tenggara adalah di sektor informal, dan dilakukan pengusaha usaha mikro, terutama mereka dari kalangan masyarakat marjinal, yang menjadi sasaran proyek ini.

Perangkat (*tools*) Daya Saing Usaha Kecil didasari pada pendekatan Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (C-BED) ILO, yang merupakan diversifikasi sektoral dari metodologi pelatihan yang tidak membutuhkan pelatih. Tahap proyek Daya Saing Usaha Kecil saat ini mencakup sektor pariwisata, berdasarkan analisa berbagai faktor seperti: kesamaan praktik yang diterapkan di semua negara ASEAN, ketersediaan saluran distribusi, peluang untuk mengembangkan UKM, hubungan antara Tujuan Pembangunan Milenium yang pro masyarakat miskin, serta pengalaman efektif ILO di sektor dan kawasan ini.

Penerima manfaat langsung dari proyek ini adalah lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah, layanan pengembangan usaha dan proyek pembangunan yang menyediakan layanan serta bantuan untuk UMKM. Sedangkan penerima manfaat akhir adalah para pengusaha di sektor pariwisata, serta masyarakat yang tinggal di lokasi usaha. Proyek ini berakhir pada Juni 2015.

Capaian Tahun 2015:

1. Penyelesaian penelitian awal dan pengembangan delapan perangkat. Dari laporan awal yang diperoleh, sektor pariwisata dipilih, di samping sub-sektor lain yang sesuai. Digunakan pada 2014, terutama untuk mengembangkan perangkat serta melaksanakan beberapa kegiatan percontohan guna meningkatkan mutu sarana yang telah dikembangkan tersebut. Menjalin sejumlah kemitraan inovatif dengan berbagai pihak (aparatur pemerintah, LSM, tokoh masyarakat) untuk memperoleh gambaran tentang sejumlah praktik terbaik secara kelembagaan dalam meluncurkan modul pelatihan serta memastikan kelangsungan program.

2. Penyebarluasan perangkat (sedang dilaksanakan), melalui pembuatan kerangka multi-media dan lokakarya guna mengidentifikasi dan menginformasikan kepada para mitra lokal utama di negara-negara ASEAN mengenai perangkat (*toolbox*) tersebut. Proyek ini menyediakan perangkat bagi negara-negara ASEAN serta memperluas cakupan penerima manfaat dan mitra potensial. Modularitas pendekatan Daya Saing Usaha Kecil memungkinkan para mitra secara mudah memasukkan perangkat ini ke dalam program masyarakat dan program bantuan berbasis sektor yang sudah ada.

3. Pengembangan materi kampanye delapan perangkat dalam bentuk situs internet, video dan informasi grafis. Materi-materi kampanye ini dikembangkan dalam sembilan bahasa (Indonesia, Burma, Inggris, Khmer, Laos, Malaysia, Tagalog, Thailand dan Vietnam) dan disosialisasikan di delapan negara-negara ASEAN.

4. Finalisasi 13 modul panduan praktik yang baik serta panduan pelatihan dalam sembilan bahasa yang meliputi sektor-sektor berikut:

Modul khusus sub-sektor:

- Pemilik penginapan/hotel kecil
- Pemilik rumah inap
- Pengusaha restoran/penjual makanan
- Pembuat kerajinan tangan
- Petani pemilik ladang kecil
- Pedagang pasar (penjual suvenir)

Modul pariwisata generik:

- Pengusaha aspiratif di sektor pariwisata.
- Pengelola tempat wisata (menjalin Kemitraan Pemerintah-Swasta guna mewujudkan pembangunan pariwisata lokal).

Produk-produk pengetahuan, serta panduan praktis, yang disesuaikan untuk setiap jenis disediakan secara online di situs <http://www.sme-tools.org>. Situs internet ini juga menyediakan video pengenalan Program Daya Saing Usaha Kecil, berbagai video studi kasus, serta video praktik 'bagaimana melakukannya' yang terkait dengan sub-sektor berbeda.

5. Peningkatan kapasitas badan pemerintah nasional dan lokal, layanan pengembangan usaha serta proyek pengembangan, masyarakat madani dan institusi akademis yang membantu UMKM di sektor pariwisata. Bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM serta otoritas pariwisata regional di sejumlah provinsi di Indonesia, Proyek ini telah menjangkau 300 pemilik losmen dan penginapan di enam tujuan dan sekitar 90 pejabat dan operator tur, termasuk 320 anggota koperasi bagi pedagang pasar dan pangan; 40 anggota asosiasi losmen dan 40 pengrajin tangan. Bersama dengan Kementerian Pertanian, Proyek ini telah menghasilkan produk-produk pengetahuan padi, kacang hijau dan jagung serta prototipenya yang diujicoba pada 900 petani.





B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.

Memperkuat Pengawasan Ketenagakerjaan

Didukung oleh:



Sekilas:

Salah satu tujuan utama dari Agenda Pekerjaan Layak Nasional Indonesia (2012-2015) adalah meningkatkan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan. Memperkuat inspektorat ketenagakerjaan dalam menangani persoalan-persoalan keselamatan dan kesehatan serta penegakan peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpadu dari kerangka keselamatan dan kesehatan kerja (K3) nasional dan berkontribusi terhadap penciptaan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang moderen dan efektif. Satu tantangan signifikan adalah menyediakan layanan K3 yang relevan dan tepat waktu bagi usaha-usaha skala kecil, tidak hanya sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah namun juga sebagai sebuah kerangka kerjasama yang melibatkan para mitra sosial di tingkat nasional dan provinsi.

ILO telah terlibat secara aktif dalam peningkatan kapasitas inspektorat ketenagakerjaan melalui berbagai inisiatif pelatihan dan bantuan teknis kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden Tahun 2010 mengenai peningkatan promosi dan koordinasi layanan ketenagakerjaan nasional. Proyek ILO-Nowergia secara spesifik mendukung penguatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan. Proyek ini juga mendorong kolaborasi dan kerjasama di tingkat internasional, regional dan nasional guna mengembangkan strategi pengawasan ketenagakerjaan nasional, menyebarkan praktik-praktik terbaik dan memperkuat jejaring. Proyek ini berakhir pada Desember 2015.

Capaian Tahun 2015:

1. **Tinjauan bersama terhadap metodologi statistik pengawasan ketenagakerjaan** guna meningkatkan pengumpulan data dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. **Penyelenggaraan Konferensi Pengawasan Ketenagakerjaan ASEAN ke-5 di Yogyakarta** dengan pengadopsian rekomendasi-rekomendasi guna memperkuat layanan pengawasan ketenagakerjaan melalui teknologi informasi dan komunikasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN.
3. **Penguatan kolaborasi dan koordinasi di antara badan-badan pemerintah dalam sektor perikanan**, khususnya dalam mengawasi kondisi kerja.
4. **Peningkatan kesadaran pekerja, pengusaha dan pengawas** mengenai pentingnya K3 di usaha-usaha kecil dan menengah, dengan fokus khusus di sektor konstruksi.



SEKITAR 20 meter dari permukaan bumi, di dalam bangunan baja yang padat, Lexi Sawa, dengan kunci pas pada satu tangan dan sabuk pengaman yang terikat dengan erat pada salah satu pipa baja, dengan cekatan menyapu setiap sendi bangunan, mengencangkan baut. Sawa sedang membangun hotel bertingkat tinggi di Abe Pura, Jayapura, Propinsi Papua, Indonesia. Ketika ia dan rekan kerjanya mencoba sekuat tenaga untuk memastikan bahwa bangunan tersebut aman dan kuat, keamanan mereka sendiri terjaga.

"Saya merasa lebih aman sekarang," kata pria berusia 23 tahun tersebut seraya memperlihatkan seperangkat alat pelindung yang ia gunakan: helm, sepatu pengaman, sabuk pengaman dengan tali penyangga dan masker. "Saya bisa melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih nyaman dan tidak perlu terlalu khawatir akan risiko pekerjaan saya."

Namun Sawa tidak selalu merasa yakin tentang keselamatannya. Ia sebelumnya pernah sangat khawatir akan mudah terjatuh dari bangunan, terutama saat musim hujan ketika kondisi kerjanya licin. "Saya selalu berpikir jika sesuatu terjadi pada saya, apa yang akan terjadi kepada orang tua saya," Sawa teringat masa-masa ketakutannya. "Mereka sudah sangat tua dan tergantung pada saya."

Namun sayangnya, meski merasa sangat khawatir, ia tidak menyadari pentingnya keselamatan. "Saya benar-benar tidak memahami keselamatan kerja. Perusahaan memberi kami peralatan untuk dipakai tapi saya tidak merasa berkewajiban memakainya," katanya.

PT. Bukit Abe Permai, perusahaan konstruksi tempat Sawa bekerja, juga menemukan adanya tantangan besar dalam memperkenalkan konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kepada 30 karyawan. "Para pekerja takut kepada petugas K3," kata Yuti Yusran, direktur perusahaan. "Jadi sangat sulit untuk berbicara tentang isu-isu K3 dengan pekerja."

Sebagai akibatnya, kecelakaan terulang. Tahun lalu, seorang pekerja terluka kakinya saat menginjak pecahan kaca tanpa mengenakan sepatu pengaman. Dua tahun sebelumnya, seorang pekerja subkontrak meninggal dunia dalam perjalanan mengambil beberapa bahan bangunan. Meskipun ia meninggal karena sakit mendadak dan bukan sebagai akibat dari kecelakaan, perusahaan harus membayar Rp. 50 juta atau sekitar US\$ 4000 untuk pemakaman dan kompensasi.

Mengencangkan baut dan memperkuat keselamatan

Salah satu alasan untuk kelalaian K3, seperti kata Yusran, adalah orang-orang di Papua, termasuk dirinya, tidak peduli akan keselamatan dan kesehatan kerja. Tetapi pikiran mereka mulai berubah ketika ia dan sejumlah pekerjaanya mengikuti pelatihan Peningkatan Kerja di Lokasi Konstruksi Kecil (WISCON).



Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan teknis dari ILO/Program Kemitraan Korea.

Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang K3, tetapi juga menunjukkan bagaimana dapat meningkatkan keselamatan pekerja. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong dan membantu konstruksi kecil dalam melakukan tindakan sederhana yang murah dan kadangkala sukarela guna mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit di tempat kerja.

"Sebelum pelatihan, pelaksanaan langkah-langkah K3 itu hanya di atas kertas dan tidak ada tindakan yang diambil," kata Yusran. "Setelah pelatihan, kami membuat rencana konkret untuk melakukan langkah-langkah perlindungan." Sawa belajar bagaimana menggunakan peralatan keselamatan dan untuk selalu memikirkan keselamatan. "Peningkatan bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti membersihkan sampah dari tempat kerja atau mengembalikan alat dengan benar," katanya.

Sekarang setiap pagi pekerjaan dimulai dengan *briefing* keselamatan. Pekerja diingatkan untuk menggunakan peralatan keselamatan, memakai baju pengaman dan membersihkan tempat kerja. "Pekerja lebih fokus pada pekerjaan mereka dan tidak terlalu khawatir tentang risiko di tempat kerja." Kata Yusran.

Herdian Tobo, inspektur tenaga kerja di wilayah tersebut, juga melihat perubahan. Para pekerja tidak menghindarinya lagi. "Papua adalah daerah terpencil di negeri ini dan sangat sulit bagi saya untuk mengunjungi semua tempat kerja atau lokasi konstruksi," kata

“ *Papua adalah daerah terpencil di negeri ini dan sangat sulit bagi saya untuk mengunjungi semua tempat kerja atau lokasi konstruksi,... Jadi penting untuk membantu para pekerja dan pengusaha menciptakan 'budaya keselamatan' di tempat kerja* **”**

Herdian Tobo
Inspektur tenaga kerja

Tobo. "Jadi penting untuk membantu para pekerja dan pengusaha menciptakan 'budaya keselamatan' di tempat kerja."

Ada sekitar 65 perusahaan konstruksi di Papua dan sebagian besar dari mereka adalah perusahaan kecil dan menengah. Mereka membangun hotel, gedung perkantoran, jalan dan jembatan. Pendekatan yang diperkenalkan oleh ILO melalui pelatihan WISCON akan terus membantu perusahaan tersebut dan bahkan seluruh perusahaan untuk memperbaiki kondisi keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan.

"Pendekatan partisipatif yang melibatkan pengawas ketenagakerjaan, pekerja dan pengusaha secara bersama-sama meninjau praktik positif yang ada akan mendorong pekerja dan pengusaha untuk terus melakukan peningkatan di tempat kerja," kata Muji Handaya, Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan tenaga putaran yang panjang dan kuat dari kunci pas, Sawa mengencangkan baut terakhir untuk hari tersebut. "Saya berharap bahwa akan ada lebih banyak pelatihan tentang K3 bagi saya dan teman-teman saya di tempat kerja," katanya. "Saya merasa bahwa pelatihan ini benar-benar berguna dan praktis." ❖

Better Work Indonesia

Didukung oleh:



Sekilas:

Better Work Indonesia (BWI) merupakan sebuah program kemitraan antara ILO dan International Finance Corporation (IFC). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan meningkatkan daya saing dalam rantai pasokan global. Fokus Better Work adalah pada solusi terukur dan berkelanjutan, melalui penguatan kerjasama antara pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja serta pembeli internasional. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja mampu menyebarkan keuntungan dari kegiatan perdagangan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, sosial dan ekonomi. Kepatuhan pada berbagai standar ketenagakerjaan dapat membantu perusahaan agar menjadi lebih kompetitif, dengan meningkatkan akses atas pasar dan pembeli baru. BWI memadukan penilaian perusahaan yang independen dengan layanan konsultasi serta pelatihan guna mendukung adanya perbaikan praktis melalui kerjasama di tempat kerja.



BetterWorkIndo



Better Work Indonesia

Capaian Tahun 2015:

1. **Pendaftaran seratus lima puluh pabrik di dalam program BWI** dengan lokasi Jakarta dan sekitarnya, Provinsi Jawa Barat (Bandung, Sukabumi dan Majalengka) dan Jawa Tengah (Semarang, Solo, Boyolali dan Wonogiri) dan Yogyakarta (Sleman).
2. **BWI kini menjangkau lebih dari 295.000** pekerja, di mana 90 persennya adalah perempuan.
3. **Terdapat 30 pembeli internasional skala besar** yang membeli produk dari pabrik-pabrik Indonesia yang telah terdaftar di BWI. Terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi pembeli yang ingin mendaftarkan pabrik mereka dalam program ini. Forum pembeli keempat diselenggarakan pada akhir September 2015.
4. **Publikasi laporan sintesa kelima BWI** memperlihatkan adanya peningkatan kepatuhan perusahaan berdasarkan penilaian siklus ketiga dan keempat mereka.
5. **Peluncuran Model Layanan Pabrik Baru untuk Layanan Konsultasi dan Penilaian**, bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dari pabrik melalui revisi siklus yang dimulai dengan diagnosis diri.
6. **Pelaksanaan pelatihan mengenai keterampilan pengawasan terhadap lebih dari 600 penyelia dari 26 pabrik.** Pelatihan ini didanai Disney Foundation dan merupakan pelatihan yang paling banyak minati sejak 2014.
7. **Penerapan mekanisme pengajuan keluhan melalui aplikasi telepon genggam.** Aplikasi telepon genggam digunakan oleh para pekerja untuk melaporkan keluhan mereka kepada manajer secara anonim. Melalui proyek yang didanai oleh Disney ini, para manajer pabrik juga dilatih mengenai bagaimana menangani keluhan, guna memastikan sistem ini sejalan dengan mekanisme pengajuan dan penanganan keluhan yang baik.
8. **Dukungan terhadap inisiatif Menteri Ketenagakerjaan mengenai Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK)** yang diatur di bawah Keputusan Menteri No. 257/2014 dengan menyelenggarakan serangkaian program berbagi pengetahuan untuk pabrik-pabrik yang terdaftar di BWI, pengawas ketenagakerjaan di tingkat lokal serta pembeli/merek internasional. Keputusan Menteri mengatur bahwa setiap pabrik wajib memiliki KNK yang bertanggungjawab atas penilaian diri pabrik tersebut.
9. **Kampanye media sosial melalui Facebook**, yang memperoleh lebih dari 20,000 likes, menargetkan pekerja, manajer dan publik.



Target Tahun 2016:

- Meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar dan menerima program pelayanan BWI menjadi 190 perusahaan.
- Melanjutkan peningkatan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan daya saing dalam rantai pasokan global kepada semua perusahaan yang terdaftar di BWI.



“kami berkomitmen untuk mempromosikan kesadaran mengenai isu-isu kesehatan di tempat kerja karena pekerja yang sehat dan produktif tidak hanya membawa manfaat bagi perusahaan namun juga bagi pekerja sendiri”

Ojang Suhandi
Bupati Kabupaten Subang

SEKITAR 1.800 pekerja perempuan dari sembilan pabrik garmen di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan antusias berkumpul di Balai Kota Subang untuk merayakan Festival Pekerja Perempuan pada 14 November 2015. Dengan menggunakan kaos dan topi berwarna oranye, mereka berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan jalan pagi santai, kompetisi tari dan drama. Mereka juga memperoleh pengetahuan dari simposium kesehatan mengenai peningkatan kesadaran akan kanker serviks yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta banyak dari mereka yang menggunakan peluang untuk melakukan dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan suplemen kesehatan bebas biaya. Selama simposium mengenai kanker serviks, banyak peserta yang mengajukan pertanyaan yang mengaitkan kondisi sanitasi di tempat kerja dengan risiko kanker serviks.

Festival ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, berkolaborasi dengan ILO melalui Program Better Work Indonesia (BWI),



Pekerja perempuan yang sehat untuk tempat kerja yang produktif

sejalan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional dan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP).

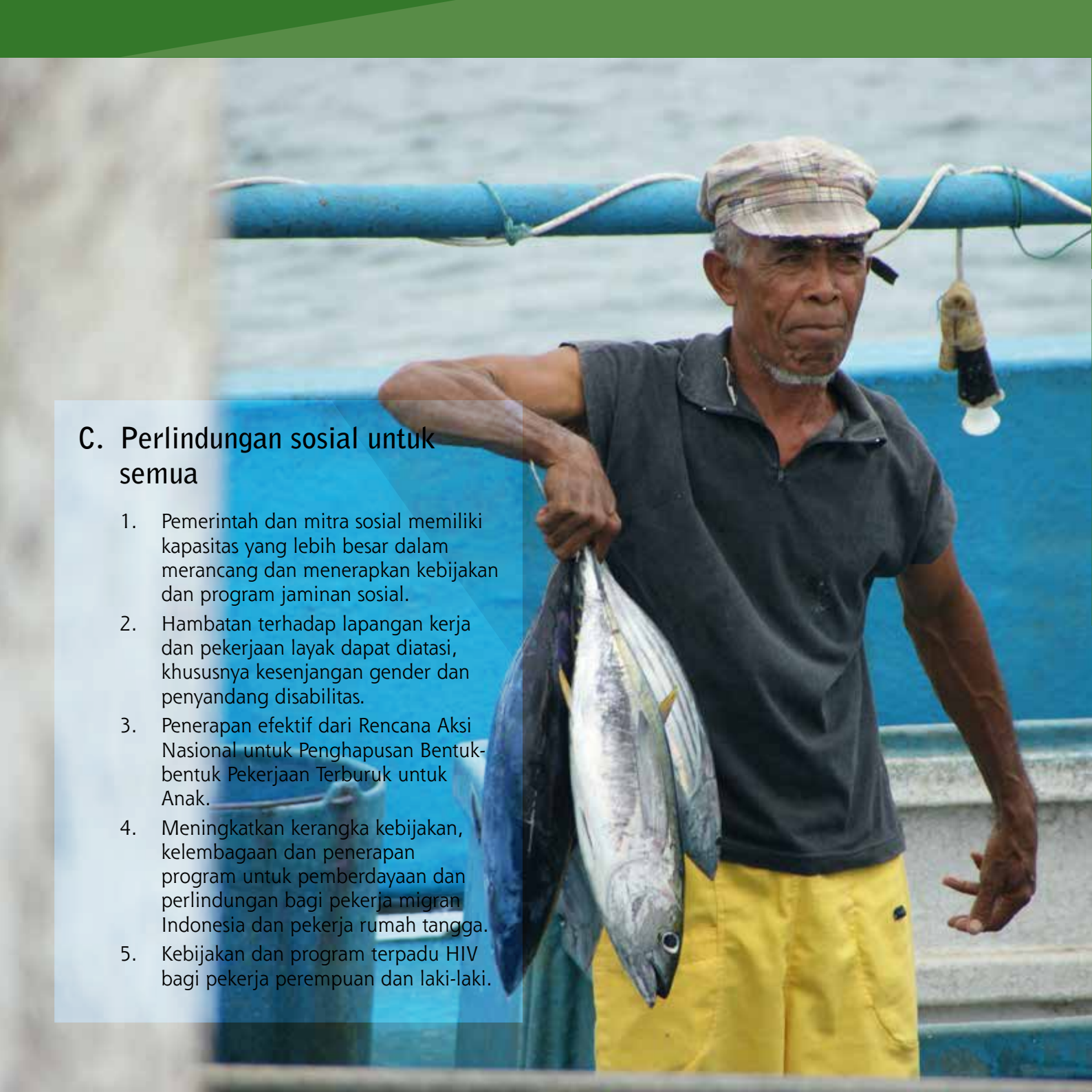
Diluncurkan secara nasional pada 2013, GP2SP diluncurkan di Kabupaten Subang oleh Bupati Subang, Ojang Suhandi, dua hari sebelum Festival pada 12 November 2015. Peluncuran ditutup dengan pemberian penghargaan bagi para lembaga, individu dan sektor swasta yang telah menunjukkan komitmen dalam menggalakkan isu kesehatan di tempat kerja. Tiga mitra pabrik BWI juga merupakan penerima penghargaan: PT. Wilbess Global, PT. Daenong Global dan PT. Hansoll Hyun.

"Ini adalah gerakan yang penting untuk Kabupaten Subang sebagai rumah dari ribuan pekerja perempuan. Seperti yang kita sadari,

anemia umumnya dialami oleh pekerja perempuan yang akan berdampak pada produktivitas mereka. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mempromosikan kesadaran mengenai isu-isu kesehatan di tempat kerja karena pekerja yang sehat dan produktif tidak hanya membawa manfaat bagi perusahaan namun juga bagi pekerja sendiri," ujar Bupati Kabupaten Subang.

Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia, Francesco d'Ovidio, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Subang atas peluncuran GP2SP. "Saya berharap program ini akan memberikan inspirasi kepada daerah lain untuk melaksanakan program yang serupa. Ketika pekerja sehat, kehadirannya di tempat kerja juga akan meningkat. Ini juga berarti peningkatan produktivitas," ia berkata. ❖



A photograph of an elderly fisherman with a weathered face and a small cap, holding a large, silvery fish. He is wearing a dark polo shirt and bright yellow pants. The background shows a blue metal railing and the sea.

C. Perlindungan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.

Jaminan Sosial Pekerja

Didukung oleh:



Sekilas:

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia menargetkan cakupan sebanyak 95 persen di bawah BPJS Kesehatan dan meningkatkan partisipasi pekerja dalam skema-skema di bawah BPJS Ketenagakerjaan dua kali lebih besar pada tahun 2019.

Pada 2015, kegiatan-kegiatan ILO dalam bidang jaminan sosial pekerja di Indonesia adalah memberikan masukan-masukan dalam berbagai forum diskusi nasional mengenai skema pensiun yang baru dan mengadvokasi sistem jaminan sosial yang bersifat inklusif secara efektif bagi pekerja migran Indonesia serta pekerja dari perekonomian informal, sejalan dengan instrumen-instrumen internasional terkait, seperti Konvensi Jaminan Sosial (standar minimum), 1952 (NO.102) dan Rekomendasi mengenai Landasan Nasional untuk Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202).

Capaian Tahun 2015:

1. **Partisipasi ILO dalam berbagai forum-forum jaminan sosial:** ILO berpartisipasi dalam Konvensi Hubungan Industrial Ketiga yang diselenggarakan di Bandung pada Mei 2015. Diskusi-diskusi yang dilakukan terfokus pada skema pensiun baru yang diterapkan pada Juli 2015. ILO juga berpartisipasi dalam berbagai forum yang menegaskan kebutuhan akan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif yang juga mempertimbangkan karakteristik khusus para pekerja migran Indonesia dan pekerja perekonomian informal.

2. **Peluncuran publikasi ILO yang baru mengenai perlindungan sosial di wilayah ASEAN:** Publikasi baru ini berjudul *"The state of social protection in ASEAN at the dawn of integration"* dan menyediakan sebuah tinjauan terhadap situasi jaminan sosial di masing-masing 10 negara anggota ASEAN, dengan menggunakan kerangka kerja dari empat jaminan yang diadopsi pada 2012 di bawah Rekomendasi Landasan untuk Perlindungan Sosial ILO (No. 202). Laporan tersebut mendokumentasikan pengalaman-pengalaman negara yang dapat menginspirasi negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan sistem jaminan sosial yang efektif. Studi tersebut juga menawarkan rekomendasi mengenai strategi praktis dan opsi kebijakan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial di wilayah tersebut dan menyediakan informasi data dasar yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan.

Target Tahun 2016:

- Finalisasi studi aktuarial dengan mempertimbangkan rancangan akhir skema pensiun yang dilaksanakan oleh pemerintah pada Juli 2015 dan merumuskan rekomendasi mengenai kelayakan skema dan keberlanjutan jangka panjang.
- Berbagi pengetahuan, rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk memperluas cakupan jaminan kepada usaha kecil dan menengah (UKM), pekerja di perekonomian informal dan pekerja mandiri.
- Membangun kapasitas berbagai pemangku kepentingan dalam sistem perlindungan sosial mengenai pemantauan dan evaluasi serta pelaporan aktuarial.

PERLINDUNGAN sosial merupakan salah satu elemen utama dari keberhasilan integrasi masyarakat ASEAN, demikian laporan terbaru ILO.

Negara-negara anggota ASEAN telah melakukan berbagai upaya yang patut dihargai dalam memperluas cakupan perlindungan sosial di negara-negara mereka, laporan tersebut menyatakan. Empat dari 10 negara telah mencapai cakupan universal jaminan kesehatan dan negara-negara anggota lainnya berkomitmen mencapai hal ini sesegera mungkin. Tercatat juga upaya serupa dalam meningkatkan pendidikan dan gizi anak-anak di ASEAN.

Laporan tersebut, berjudul *"The State of Social Protection in ASEAN at the Dawn of Integration"*, diluncurkan pada 25 November 2015 di Jakarta, pada seminar tripartit mengenai meningkatkan perlindungan sosial dalam masyarakat ASEAN. Peluncuran tersebut dihadiri perwakilan-perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial ASEAN, serikat pekerja, organisasi pengusaha serta para mitra pembangunan.

“Mempercepat perluasan perlindungan sosial merupakan kebutuhan yang tak terelakkan, khususnya saat ini guna memastikan manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN diterjemahkan menjadi kesejahteraan bersama dan pembangunan yang adil, dan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”

Francesco d'Ovidio
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Dipublikasikan tepat sebelum peluncuran Masyarakat Ekonomi ASEAN pada bulan berikutnya, laporan ini menegaskan temuan-temuan studi ILO dan ADB baru-baru ini *"ASEAN Community 2015: Managing integration for better jobs and shared prosperity"* yang menyimpulkan bahwa perlindungan sosial merupakan komponen yang amat penting dalam memastikan pendistribusian manfaat dari Masyarakat Ekonomi

Laporan baru ILO: Keberhasilan integrasi ASEAN memerlukan perlindungan sosial

ASEAN secara merata di antara negara, sektor ekonomi, kelompok keterampilan dan gender.

Namun, hak manusia atas perlindungan sosial masih baru dinikmati oleh sebagian besar orang di wilayah ini. Setengah dari angkatan kerja tidak memiliki perlindungan atas kecelakaan kerja dan penyakit. Kurang dari satu di antara tiga orang yang menerima jaminan hari tua atau pensiun.

Laporan tersebut menetapkan sebuah tolok ukur untuk mengukur kemajuan dalam memperluas landasan dan sistem jaminan sosial. Landasan perlindungan sosial menjamin bahwa, dalam sebuah negara, tiap warga negara dengan segala usia dapat menikmati jaminan penghasilan dan akses atas layanan sosial dan perawatan kesehatan dasar. Rekomendasi utama dalam laporan ini meliputi lebih banyak penggabungan risiko (*risk pooling*) dan redistribusi risiko melalui skema asuransi sosial dan pembiayaan pajak, koordinasi intervensi perlindungan sosial yang lebih baik, partisipasi para mitra sosial yang lebih efektif dalam perancangan dan penerapan skema-skema, serta dukungan politik yang lebih besar untuk menciptakan ruang fiskal guna mendanai landasan perlindungan sosial.

"Mempercepat perluasan perlindungan sosial merupakan kebutuhan yang tak terelakkan, khususnya saat ini guna memastikan manfaat



dari integrasi ekonomi ASEAN diterjemahkan menjadi kesejahteraan bersama dan pembangunan yang adil, dan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan," ujar Francesco d'Ovidio, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste.

Seminar tripartit dua hari mengenai peningkatan perlindungan sosial dalam sebuah masyarakat ASEAN yang terintegrasi dihadiri perwakilan badan-badan pemerintah,

organisasi pekerja dan pengusaha, pakar-pakar PBB dan ahli-ahli masyarakat madani.

Delegasi mendiskusikan peran kebijakan perlindungan sosial dalam memfasilitasi integrasi ekonomi, sosial dan budaya ASEAN, serta langkah-langkah untuk memperlancar perubahan ekonomi nasional dan memfasilitasi perlindungan sosial lintas batas. Mereka juga mendiskusikan cara-cara memperluas cakupan perlindungan sosial

kepada para pekerja migran. Diskusi-diskusi tersebut dirancang untuk membantu para pembuat kebijakan dan praktisi memperbaiki sistem perlindungan sosial dan meningkatkan koordinasi.

Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan dukungan dari ILO-Proyek Jepang-ASEAN untuk Jaminan Penghasilan dan Layanan Ketenagakerjaan dan proyek ILO yang didanai pemerintah Kanada, Aksi Tripartit untuk Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran. ❖



Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundang-undangan (PROPEL-Indonesia)

Didukung oleh:



Sekilas:

Proyek ILO-PROPEL Indonesia bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam perlindungan kebijakan dan peraturan perundangan terkait pekerjaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas agar kebijakan dan peraturan perundangan tersebut konsisten dengan standar internasional. Proyek ini mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam pekerjaan dan pelatihan, melalui kerjasama dengan para mitra dalam membangun kapasitas pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Didanai Irish Aid, Proyek PROPEL-Indonesia dimulai pada Juni 2012, sebagai bagian dari Proyek PROPEL global yang telah dilaksanakan di sejumlah negara di kawasan Asia dan Afrika.

Capaian Tahun 2015:

1. **Pemberian penghargaan kepada para mahasiswa di UNIKA Atma Jaya, Jakarta dan UNIKA Widya Mandira, Kupang** dalam melaksanakan riset mengenai isu-isu hukum terkait kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.
2. **Pelaksanaan kajian terhadap aksesibilitas fisik dari enam balai latihan kerja di Jawa Timur.** Kajian ini dilakukan oleh seorang tim riset dari Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, Jawa Timur.
3. **Dukungan teknis terhadap sesi-sesi interaktif Kementerian Ketenagakerjaan sebagai upaya meningkatkan kesadaran mengenai berbagai kebijakan dan program terkait peluang kerja bagi penyandang disabilitas** kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Sesi-sesi interaktif ini diselenggarakan di Bandung, Banjarmasin, Batam dan Banten sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam menggalang dukungan dari beragam pemangku kepentingan mengenai kebijakan yang memungkinkan para penyandang disabilitas untuk bekerja.
4. **Penguatan kapasitas pejabat Kementerian Ketenagakerjaan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.** Kementerian Ketenagakerjaan pada 2015 meluncurkan Pelatihan Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas (Disability Equity Training/DET), berdasarkan pelatihan DET ILO serta strategi non-diskriminasi bagi pejabat ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan menggunakan anggaran pemerintah. Ini merupakan inisiatif baru dan penting yang dilakukan pemerintah guna memberdayakan pemerintah daerah mengenai isu-isu disabilitas dan ketenagakerjaan.
5. **Pelaksanaan Forum Jejaring untuk Perusahaan mengenai Penempatan Pekerja dengan Disabilitas, bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.** Dilakukan melalui Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia, Forum ini didedikasikan bagi para pengusaha Indonesia untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai bagaimana memanfaatkan pasar dan potensi para penyandang disabilitas.
6. **Dukungan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.** Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menandatangani sebuah Nota Kesepahaman mengenai Penempatan dan Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas pada Desember 2015, sebagai sebuah upaya untuk menyediakan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
7. **Jalinan kerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait isu disabilitas,** sebagai upaya untuk menyediakan kesempatan kerja yang setara bagi para penyandang disabilitas, khususnya para perempuan dengan disabilitas. Salah satu organisasi tersebut adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).
8. **Memasukkan isu-isu terkait dengan disabilitas ke dalam program-program ILO lainnya di Indonesia.** ILO-PROPEL, bekerjasama dengan berbagai proyek/program ILO lainnya, melakukan kegiatan berbagi pengetahuan dan informasi mengenai disabilitas, seperti Proyek ILO-MAMPU yang terfokus pada perempuan yang terlibat dalam pekerjaan rumahan dan Better Work Indonesia yang menangani masalah kepatuhan standar-standar ketenagakerjaan.

Target Tahun 2016:

- Meneruskan kerjasama dengan para pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan sektor swasta, badan usaha negara, dan lembaga pelatihan dalam mewujudkan contoh-contoh konkret dari tempat kerja yang inklusif bagi perempuan dan laki-laki dengan disabilitas.
- Menyelenggarakan forum bisnis sebagai wadah berbagi informasi dan wawasan dari berbagai pihak dalam upaya membangun jaringan antara perusahaan, badan pemerintah, institusi pelatihan, dan organisasi penyandang disabilitas untuk membuka akses yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas terhadap kesempatan kerja. Ini sejalan dengan tujuan utama untuk membangun Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia.
- Melanjutkan dukungan teknis terhadap sesi-sesi interaktif yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai kesempatan kerja dan disabilitas. Empat wilayah Indonesia yang berbeda akan dipilih sebagai daerah sasaran tahun ini.
- Melanjutkan penyediaan dukungan teknis kepada Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pelatihan DET.
- Melakukan analisis mengenai pekerja dengan disabilitas dengan menggunakan survei angkatan kerja tahunan dari BPS Indonesia.



Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN sediakan peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas

TANGGAL 11 Desember 2015 ditandai sebagai sebuah langkah penting dalam menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di tempat kerja. Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Penempatan dan Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di BUMN-BUMN.

Nota Kesepahaman menyatakan bahwa Kementerian BUMN wajib menyediakan kesempatan dan perlakuan yang sama, fasilitas yang dapat diakses dan dukungan kerja lain yang dibutuhkan serta menyelenggarakan pelatihan kerja bagi para pekerja penyandang disabilitas. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan diwajibkan untuk menyediakan informasi mengenai kesempatan kerja, memfasilitasi pemagangan, memfasilitasi penempatan, memantau penempatan dan melakukan program sensitisasi mengenai isu-isu yang terkait dengan disabilitas di BUMN.

“Nota Kesepahaman ini merupakan aksi konkret yang akan menyediakan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Perusahaan memiliki banyak pengalaman positif dalam memperkerjakan dan mempertahankan penyandang disabilitas. Mereka seringkali menjadi pekerja yang paling rajin, loyal dan produktif,” ujar Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan, mengomentari penandatanganan Nota ini.

Sementara itu, Rini Sumarno, Menteri BUMN, menegaskan bahwa dengan penandatanganan ini BUMN dapat menjadi contoh positif bagi badan-badan usaha lain sehingga mendorong semakin banyak perusahaan yang akan membuka pintu mereka bagi penyandang disabilitas. “Kita semua harus menyediakan peluang kerja yang

“Kita semua harus menyediakan peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama dengan pekerja lainnya”

Rini Sumarno
Menteri BUMN



setara bagi penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama dengan pekerja lainnya,” tegasnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini disaksikan perwakilan dari ILO, Direktur-direktur BUMN, organisasi-organisasi penyandang disabilitas, badan-badan pemerintah terkait, sektor swasta dan sebagainya. ♦

Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja

Didukung oleh:



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade



Sekilas:

Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja yang diadopsi Juni 2010 mengakui pentingnya peranan yang dimainkan perusahaan dalam membatasi penularan dan dampak epidemik HIV. Kantor ILO di Indonesia telah memobilisasi konstituen tripartit untuk menetapkan kebijakan perusahaan tentang HIV dan AIDS yang difokuskan pada tiga hasil berikut: 1) Menghapuskan diskriminasi kerja terhadap orang yang hidup dengan HIV (ODHA); 2) Melakukan upaya pencegahan dan tes HIV secara sukarela yang dikaitkan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) formal dan informal; serta 3) Memastikan akses atas layanan, pengobatan dan bantuan bagi pasien HIV melalui tempat kerja.

Program ILO ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang HIV dan AIDS, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2004, dan Rencana Strategis Nasional tentang HIV dan AIDS 2010-2014.

Capaian Tahun 2015:

1. **Pengesahan Pedoman Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja** oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan.
2. **Penyediaan bantuan teknis dan dukungan kepada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mengenai Gugus Tugas Kesehatan**, khususnya dalam memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat populasi kunci untuk meningkatkan akses dan memantau pelaksanaan skema asuransi kesehatan nasional yang baru.
3. **Penyediaan dukungan kepada Kongres Nasional AIDS** untuk program HIV di tempat kerja.
4. **Partisipasi lebih dari 150 perusahaan dalam inisiatif VCT@Work**, menyediakan lebih dari 1 juta pekerja dengan akses atas informasi pencegahan HIV, konseling dan tes.
5. **Penguatan kerangka kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Jayapura** guna memobilisasi sektor swasta dalam memberikan informasi mengenai Pencegahan HIV, Pengobatan dan Perawatan bagi pekerja berisiko tinggi.
6. **Dukungan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Jayapura** untuk mengembangkan kebijakan bagi Kelompok Kerja untuk HIV di Tempat Kerja.

Target Tahun 2016:

- Membantu Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Model Pendanaan baru dari Dana Global, khususnya untuk mencapai para pekerja pelabuhan.
- Mendukung penyusunan strategi nasional selepas pelaksanaan program HIV di tempat kerja.
- Terus mendukung keterlibatan yang lebih besar dari orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) dalam proses pembuatan kebijakan nasional, meningkatkan akses dan menghilangkan hambatan terhadap pelayanan kesehatan.

Sektor swasta di Papua dan Papua Barat berkomitmen terhadap program pencegahan HIV di tempat kerja

UNTUK menandai 18 bulan pelaksanaan Proyek ILO mengenai Mobilisasi Sektor Swasta untuk Pencegahan, Pengobatan dan Perawatan HIV di Daerah Prevalensi Tinggi Papua dan Papua Barat, dua pertemuan Kelompok Kerja HIV di Tempat Kerja diadakan pada 18-20 Januari 2016. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk berbagi hasil kajian Proyek dan melaporkan kegiatan Proyek yang dilakukan sejak Mei 2014 hingga Desember 2015.

Sepuluh perusahaan di Kabupaten Sorong dan Jayapura (lima perusahaan di masing-masing kabupaten) telah berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaan program HIV di tempat kerja, bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui pusat kesehatan masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan pencegahan, konseling dan tes HIV yang efektif serta layanan dukungan pengobatan bagi para pekerja mereka.

Salah satu perusahaan di Kabupaten Sorong, JOB Pertamina Petrochina, telah melakukan berbagai tes HIV dan pengobatan bagi pekerja mereka. "Kami berkomitmen karena perusahaan diperbolehkan untuk secara independen menyediakan layanan terkait HIV. Tindakan inovatif telah dilakukan untuk menarik perhatian para pekerja agar bersedia melakukan tes dan pengobatan HIV secara sukarela. Kami melakukan diskusi kesehatan dan donor darah secara

rutin serta membagikan souvenir,” jelas Dr. Wilkananta dari JOB Pertamina Petrochina.

“Inisiatif ini telah membantu kami untuk menjangkau lebih banyak pekerja melalui Tes dan Konseling HIV. Mengingat jarak yang jauh ke rumah sakit terdekat, kami saat ini menyediakan perawatan HIV bagi pekerja yang hidup dengan HIV. Saya berharap hubungan yang kuat antara perusahaan dan kantor kesehatan dapat dilanjutkan,” kata Dr. Andreas Ari Wibowo dari Sinar Mas di Jayapura.

Pemerintah daerah, yang diwakili oleh Suka Harjono, SSos., Msi, Wakil Bupati, yang juga bertindak sebagai Ketua Komisi AIDS di Kabupaten Sorong dan Harold Monim, S.Sos., MSi, Kepala Kantor Ketenagakerjaan di Kabupaten Jayapura, sangat mendukung pelaksanaan program Proyek. Mereka berdua menekankan bahwa program HIV dan AIDS bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif dari sektor swasta sangat dibutuhkan mengingat tempat kerja memainkan peran penting dalam program pencegahan HIV.

Francesco d'Ovidio, Direktur ILO di Indonesia, sangat menghargai dukungan kuat yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan Jayapura serta pemangku kepentingan terkait lainnya seperti Komisi AIDS lokal, Kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Puskesmas, organisasi pekerja dan pengusaha serta sektor swasta dan pekerja mereka.

“Setelah lebih dari satu tahun pelaksanaan, kemajuan yang dicapai sangat bagus. Sepuluh perusahaan telah menyatakan



komitmen mereka untuk melanjutkan program-program pencegahan HIV di perusahaan. Dengan dukungan dan komitmen yang kuat tidak hanya dari sektor swasta, tetapi juga dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, saya percaya kemajuan yang dibuat dapat dilanjutkan dan dipertahankan untuk bersama-sama mengakhiri HIV dan AIDS di Papua dan Papua Barat,” katanya.

Didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) dari Pemerintah Australia, Proyek ini bertujuan mengembangkan model biaya rendah dalam pelaksanaan pencegahan, konseling dan tes serta dukungan layanan pengobatan HIV yang efektif melalui sektor swasta di dua kabupaten yang menjadi sasaran: Sorong dan Jayapura. Kegiatan yang telah dilakukan mencakup kerangka kerjasama antara

departemen kesehatan dan tenaga kerja provinsi dan daerah, organisasi masyarakat, sektor swasta dan organisasi terkait lainnya. ❖

“ Kami berkomitmen karena perusahaan diperbolehkan untuk secara independen menyediakan layanan terkait HIV. Tindakan inovatif telah dilakukan untuk menarik perhatian para pekerja agar bersedia melakukan tes dan pengobatan HIV secara sukarela. Kami melakukan diskusi kesehatan dan donor darah secara rutin ”

dr Wilkananta
JOB Pertamina Petrochina

PROMOTE: Kerja yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga Guna Mengakhiri Pekerja Anak Rumah Tangga

Didukung oleh:



Sekilas:

Pada Juni 2011, ILO mengadopsi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang akan memperluas, bagi negara-negara yang meratifikasinya, jangkauan perlindungan bagi jutaan pekerja, terutama perempuan dan anak-anak, yang hak-hak dasarnya belum terjamin. Melalui pengadopsian ini, Konferensi Perburuhan Internasional menegaskan: PRT, juga pekerja lainnya, berhak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak. Konvensi ini dengan jelas menegaskan bahwa anak-anak di atas usia minimum untuk bekerja harus diberi perlindungan khusus saat melakukan pekerjaan domestik. Proyek "PROMOTE" mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT sebagai upaya mengurangi pekerja rumah tangga anak (PRTA).

Proyek PROMOTE bertujuan untuk mengurangi PRTA secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi-organisasi PRT agar dapat mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT secara efektif. Proyek ini berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian organisasi PRT untuk mengurangi PRTA serta mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT, dengan fokus utama pada Indonesia, sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia dan tempat tinggal bagi jutaan PRT dan PRTA. Efektivitas kegiatan di Indonesia tentunya akan berpengaruh dan berdampak besar pada pengembangan kebijakan di kawasan ini, terutama di ASEAN.

Pada Juli 2014, Nota Kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan Proyek PROMOTE telah ditandatangani oleh ILO Jakarta dan Kementerian Ketenagakerjaan, dan Rencana Aksi/Rencana Kerja PROMOTE pun telah disetujui Komite Penasihat Proyek pada pertengahan September 2014.

Capaian Tahun 2015:

1. **Peningkatan kesadaran mengenai pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA melalui berbagai wadah media dan media sosial.** Pelibatan media dilakukan secara aktif melalui acara bincang-bincang dan program layanan masyarakat. Melalui media sosial, akun Facebook telah disukai lebih dari 7.500 pengguna Facebook dan akun Twitter telah mencapai 7.600 pengikut.
2. **Peluncuran Kode Etik Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI), dengan dukungan dari ILO.** Kode Etik ini menyediakan panduan bagi para anggota APPSI mengenai penerapan ketentuan upah minimum (18 tahun) dalam perekrutan dan penempatan PRT dan mengenai perlindungan semua PRT melalui pemantauan setelah kegiatan penempatan.
3. **Pelibatan kaum muda dalam mempromosikan pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA menggunakan video dan foto cerita.** Berkolaborasi dengan Yayasan Kampung Halaman (YKH), ILO memfasilitasi kaum muda (pelajar) di Jakarta dan Makassar untuk memproduksi sembilan video dan foto cerita yang ditayangkan di jaringan bioskop terbesar di kedua kota tersebut, dihadiri oleh lebih dari 600 orang muda. Hingga saat ini, video dan foto cerita tersebut terus ditayangkan di berbagai sekolah dan forum anak di empat provinsi sasaran (Jakarta, Lampung, Surabaya dan Makassar).
4. **Sensitisasi dan mobilisasi media untuk mempromosikan pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA.** Berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, ILO-PROMOTE menyediakan beasiswa media bagi para jurnalis guna mempublikasikan berbagai penulisan atau reportase mendalam mengenai isu-isu yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga, termasuk PRTA. Serangkaian pelaporan dan reportase mendalam ini dipublikasikan di delapan media pada Agustus-September 2015.
5. **Peluncuran sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan akses atas informasi bagi para PRT dan pemberi kerja.** Diharapkan bahwa melalui sistem ini, sekitar 20.000 PRT akan terjangkau dan menerima informasi pendidikan terkait dengan pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA.
6. **Pengembangan Sistem Pemantauan Berbasis Komunitas.** Berkolaborasi dengan JARAK, sebuah organisasi mitra ILO-PROMOTE, Proyek menyusun sebuah sistem pemantauan berbasis komunitas mengenai Peraturan Menteri No. 2/2015 yang menginstruksikan bahwa semua PRT harus didaftarkan melalui ketua RT/RW. Sistem ini juga telah dikonsultasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan akan diujicobakan di sejumlah komunitas di empat provinsi sasaran proyek ini.
7. **Pengembangan perangkat pemantauan mandiri atas kondisi kerja para PRT guna meningkatkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pekerjaan rumah tangga.** ILO-PROMOTE mengembangkan sebuah metode praktis guna mendukung inisiatif-inisiatif tempat kerja dalam lingkungan kerja rumah tangga berdasarkan pada aksi mandiri secara sukarela. Ini membantu masyarakat melakukan perbaikan K3 dan kondisi kerja dengan mempergunakan berbagai sumber daya yang tersedia.
8. **Pembentukan sekolah-sekolah PRT di empat provinsi.** ILO-PROMOTE, berkolaborasi dengan JALA PRT (sebuah jejaring LSM yang menangani isu PRT) dan anggota-anggotanya di empat provinsi sasaran, telah membentuk enam sekolah PRT di Jakarta, Lampung, Surabaya dan Makassar. Sekolah-sekolah tersebut menyediakan berbagai sesi pendidikan agar PRT menjadi lebih profesional dan lebih berdayakan.

9. Ribuan PRT di empat provinsi sasaran telah dijangkau dan sekitar 600 dari mereka menerima manfaat dari berbagai sesi pendidikan mengenai pekerjaan layak untuk PRT melalui sekolah PRT dan kegiatan terorganisir lainnya.

10. Peluncuran jejaring komunikasi berbasis web. ILO mendukung Federasi Pekerja Rumah Tangga Internasional untuk membangun jejaring komunikasi berbasis web di antara PRT dan organisasi PRT di wilayah Asia. Jejaring secara rutin meluncurkan diskusi berbasis web dan mengunggah berbagai materi komunikasi dan produk pengetahuan. Saat ini lebih dari 8.000 pengguna internet yang telah terdaftar sebagai anggota jejaring.



Target Tahun 2016:

- Menyelenggarakan sesi pendidikan dalam sekolah PRT dan mengorganisir kegiatan di empat wilayah sasaran, memberikan manfaat kepada 1.500 PRT.
- Menyusun sebuah kurikulum untuk meningkatkan keterampilan profesional PRT dan mengujicoba kurikulum sekolah PRT di Jakarta.
- Menyebarkan berbagai informasi terkait dengan pekerjaan layak untuk PRT melalui SMS, yang bertujuan menjangkau pendaftaran sebanyak 20.000 PRT.
- Mendukung penerapan rencana adokasi nasional dan provinsi untuk menghapus PRTA dan melindungi PRT.
- Melakukan kajian mengenai risiko kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan rumah tangga.
- Meningkatkan daya tanggap sejumlah layanan konseling (*hotline*).
- Membangun jejaring informal dari penyedia layanan sosial di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Mengujicoba sistem berbasis komunitas untuk memantau PRTA dan mendukung pekerjaan layak untuk PRT.
- Memperbaiki metodologi untuk memperkirakan jumlah PRT dan PRTA di tingkat provinsi dan nasional serta menggunakan metodologi tersebut untuk memperkirakan jumlahnya.
- Memobilisasi para pemimpin agama di empat provinsi sasaran untuk mempromosikan pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA.
- Membangun kemitraan inovatif dengan entitas bisnis dan masyarakat madani guna mengurangi prevalensi PRTA dan mendorong pekerjaan layak untuk PRT di Indonesia.

Kaum muda Indonesia mendorong pekerjaan layak untuk PRT melalui video dan foto bercerita



SEPANJANG hidupnya, Farhan H. Warits, seorang pelajar sekolah menengah atas di Jakarta, tidak mengetahui siapa yang mencuci, menyetrika dan melipat bajunya dengan rapi hingga suatu hari ia kehabisan pakaian di lemarnya. Ia akhirnya mengetahui tentang Mpok Fatimah yang, selama bertahun-tahun, telah bekerja di rumahnya sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Dari pakaian yang dilipat rapi, Farhan akhirnya terkagum-kagum dengan kisah hidup Mpok Fatimah yang menakjubkan.

Bagi Muhammad Handika, ibunya, Nuryati, telah bekerja sebagai PRT di Makassar sejak usia 11 tahun. Meski tidak pernah berkesempatan mengejar cita-citanya menjadi seorang guru, ia berharap anak-anaknya dapat menempuh pendidikan lebih tinggi. Handika sangat bangga dengan profesi dan kerja keras ibunya.

“PRTA adalah pekerjaan berisiko tinggi. Mereka beruntung jikalau mendapatkan majikan yang baik; ada kemungkinan juga bahwa mereka akan diperdagangkan bukan bekerja”

Arvin Wirarendra
Peserta TRTS

Alifia Adita atau Fia memiliki kisah menarik lainnya dengan PRT. Mereka sudah menjadi teman akrab sejak berusia 12 tahun. Adilla Prasetyo atau Ella sudah tinggal dengan dan bekerja untuk keluarga Fia selama lebih dari lima tahun. Orangtua Fia mengirim Ella ke

“PRT adalah pekerja dan mereka harus memiliki jam kerja yang pasti, deskripsi kerja yang wajar dan memiliki hak yang sama seperti pekerja-pekerja lainnya”

Aji Pangestu
Peserta TRTS

sekolah dan sekarang ia bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berusia sama, Fia dan Ella tumbuh menjadi teman akrab berbagi kebahagiaan dan kesedihan.

Kisah Farhan, Handika dan Fia merupakan tiga dari sembilan video dan foto bercerita yang diproduksi oleh 25 kaum muda berusia 12-17 tahun, dipilih dari ratusan orang muda, di Jakarta dan Makassar, yang memperlihatkan peran PRT dalam kehidupan mereka, interaksi keseharian mereka dengan PRT dan kehidupan PRT dari sudut pandang kaum muda.

Dengan menggunakan kata-kata dan pemilihan adegan mereka sendiri, video-video dan foto-foto ini mendokumentasikan kehidupan sehari-hari, penderitaan, perjalanan, dan harapan para PRT. Video-video dan foto-foto ini terdiri dari empat video diary dan lima foto bercerita dengan durasi total sepanjang 90 menit.

“Program ini menyediakan beasiswa bagi para pelajar yang terpilih untuk memproduksi video diary dan foto bercerita mengenai pengalaman dan pandangan mereka sendiri dalam berinteraksi dengan PRT di rumah atau di lingkungan sekitar mereka. Mengingat kaum muda bersifat kreatif dan bertindak sebagai agen perubahan dalam masyarakat, kisah-kisah nyata yang dihasilkan mereka akan menjadi alat yang baik untuk meningkatkan kesadaran guna membuat persoalan-persoalan yang dihadapi PRT menjadi terlihat nyata, dan pada gilirannya berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik bagi PRT dan penghapusan PRTA di Indonesia,” ujar Arum Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis Proyek ILO-PROMOTE.

Untuk pertama kalinya dilakukan, video-video dan foto-foto ini difasilitasi oleh ILO-PROMOTE berkolaborasi dengan Yayasan Kampung Halaman (YKH) di bawah program bernama: Program Teman Remaja Teman Setara (TRTS). Program ini bertujuan untuk

melibatkan kaum muda dalam dua isu: membuat kehidupan yang lebih baik pada PRT dan menghapuskan PRTA.

Video-video diary dan foto-foto bercerita ini diluncurkan di Jakarta dan Makassar, bersamaan dengan perayaan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak dan Hari PRT Internasional pada Juni 2015 di jaringan bioskop terbesar XXI. Lebih dari 600 penonton menghadiri peluncuran tersebut, termasuk pejabat pemerintah, serikat pekerja, akademisi, pengusaha, pelajar, media massa dan masyarakat umum. Penayangan video dan foto ini diikuti diskusi mengenai pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA.

Fifit Tuffahati, salah satu seorang peserta yang terlibat dalam program, sekarang lebih menghargai profesi PRT. “Mereka bukan hanya pahlawan bagi keluarganya, tapi juga pahlawan bagi lainnya,” ujarnya.

Aji Pangestu, peserta lainnya, menyadari bahwa PRT harus diakui sebagai pekerja. “PRT adalah pekerja dan mereka harus memiliki jam kerja yang pasti, deskripsi kerja yang wajar dan memiliki hak yang sama seperti pekerja-pekerja lainnya.”

Sementara Arvin Wirarendra, salah satu peserta, mengangkat keprihatinan terhadap PRTA. “PRTA adalah pekerjaan berisiko tinggi. Mereka beruntung jikalau mendapatkan majikan yang baik; ada kemungkinan juga bahwa mereka akan diperdagangkan bukan bekerja,” kata dia, mengomentari salah satu kisah mengenai PRTA.

PRTA mewakili kelompok pekerja perempuan berupah terbesar yang berkontribusi terhadap rumah tangga lainnya di negara mereka sendiri atau di luar negeri. Kendati peran PRT sangat penting, pekerjaan rumah tangga belum diakui sebagai sebuah pekerjaan.

Mengingat pekerjaan mereka yang dilakukan di dalam ranah rumah tangga pribadi, yang tidak dianggap sebagai tempat kerja di banyak negara, hubungan kerja mereka tidak tercakup dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional atau peraturan lainnya sehingga mengingkari pengakuan status mereka sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan kerja.

Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional 2012, ILO Jakarta memperkirakan bahwa ada sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia; dengan 111.000 di antaranya adalah anak-anak berusia 15 – 17 tahun. ❖

Aksi Tripartit untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek ASEAN Triangle)

Didukung oleh:



Sekilas:

Selama beberapa tahun terakhir, volume dan kompleksitas perpindahan pekerja dari dan di dalam kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan. Tren ini disebabkan beberapa faktor, seperti perubahan demografis, kesenjangan penghasilan, masalah keamanan, jaringan migran yang dibentuk serta transportasi yang lebih baik. Kendati pekerja migran memberi kontribusi besar untuk negara asal maupun tujuan, banyak di antara mereka—terutama yang berstatus tidak tetap—masih menghadapi masalah pelanggaran hak asasi manusia dan hak mereka sebagai pekerja.

Tidak ada pendekatan unilateral yang efektif terkait tata kelola migrasi pekerja. Beberapa tindakan yang diambil di negara asal memiliki konsekuensi besar di negara tujuan dan demikian pula sebaliknya. Di samping itu, ada kesamaan tantangan yang dihadapi pekerja migran perempuan dan laki-laki, penyedia layanan serta pemerintah di kawasan ini.

Proyek Triangle yang didanai Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan Kanada (DFATD) ini bertujuan mengurangi secara signifikan eksploitasi terhadap pekerja migran di kawasan ini melalui peningkatan perlindungan hukum dan migrasi yang aman serta peningkatan perlindungan bagi para pekerja. Proyek ini mempromosikan pendekatan bilateral dan regional untuk mengatasi masalah bersama, membuat regionalisme menjadi lebih efektif, serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di ASEAN. Tujuan proyek ini adalah sesuai dengan prioritas strategis Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN (2010-2015).

Capaian Tahun 2015:

1. Pertemuan Regional Kedua mengenai Perlindungan Pekerja Perikanan Migran: Pertukaran Informasi ASEAN tentang Panduan mengenai Inspeksi Kondisi Kerja dan Kehidupan berdasarkan Bendera Negara di Kapal-kapal Ikan. Pertemuan regional ini, yang diselenggarakan pada April 2015 di Jakarta, Indonesia, terfokus pada perlindungan para pekerja perikanan migran dan dirancang untuk mendiskusikan kerjasama yang lebih terperinci terkait perlindungan terhadap para pekerja perikanan migran. Pertemuan ini menghadirkan standar-standar dan instrumen-instrumen internasional mengenai pekerjaan penangkapan ikan, berbagi informasi mengenai perkembangan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan serta prosedur-prosedur terkait dengan pemeriksaan berdasarkan bendera negara dan negara tempat kapal berlabuh serta menyediakan masukan terkait penyusunan rancangan Panduan mengenai Inspeksi Kondisi Kerja dan Kehidupan berdasarkan Bendera Negara di Kapal-kapal Ikan terkait dengan penerapan Konvensi ILO No.188 mengenai Pekerjaan di Sektor Perikanan. Pertemuan ini dihadiri perwakilan tripartit ILO dan organisasi-organisasi non-pemerintah di wilayah ASEAN.

2. Penyelenggaraan Forum ASEAN ke-8 mengenai Pekerja Migran (8th AFML): Pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan tahunan yang mempertemukan perwakilan-

perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha serta organisasi masyarakat madani di negara-negara anggota ASEAN guna membahas berbagai permasalahan terkait perlindungan hak-hak pekerja migran di wilayah ASEAN. Untuk tahun 2015, AFML diselenggarakan di bulan Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tema "Memberdayakan Masyarakat ASEAN melalui Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran," yang terfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja migran di tempat kerja serta pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

3. Integrasi Ekonomi ASEAN dan Migrasi Tenaga Kerja: Tantangan dan Peluang: Kursus ASEAN ke-3: Kursus pelatihan 2015 merupakan pelatihan ketiga yang diselenggarakan bersama oleh ILO, Center on Migration, Policy and Society (COMPAS) di Universitas Oxford dan Pusat Pelatihan Internasional ILO (ITC). Pada 2015, sebuah kursus selama lima hari dilaksanakan di Bali, Indonesia, yang ditujukan bagi para pejabat tingkat menengah ditingkatkan direktur. Pelatihan ini menyediakan peluang bagi para peserta untuk menghadiri serangkaian kuliah mengenai isu-isu kontemporer dalam migrasi kerja yang diberikan oleh akademisi dan pakar kebijakan internasional serta regional terkemuka.

Target Tahun 2016:

- Menyelenggarakan pertemuan pertama bersama Konfederasi Pengusaha ASEAN dan Dewan Serikat Pekerja ASEAN di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini bertujuan meningkatkan kerjasama antara organisasi pekerja serta organisasi pengusaha, mengembangkan perangkat dan menyediakan panduan bagi serikat pekerja dan organisasi pengusaha di wilayah ASEAN agar menjadi lebih aktif dalam melakukan dialog kebijakan dan perlindungan hak-hak pekerja migran.



PERMASALAHAN pekerjaan perikanan merupakan permasalahan penting bagi negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara. Lebih dari 87 persen pekerja perikanan dunia dan 73 persen kapal ikan global berasal dari Asia (FAO, 2012). Pekerja migran Kamboja dan Myanmar, misalnya, bekerja di kapal ikan Thailand di perairan Malaysia dan Indonesia; sementara di luar kawasan ASEAN, pekerja perikanan Vietnam, Indonesia dan Filipina bekerja di kapal-kapal Korea dan Taiwan.

Dengan meningkatnya perhatian pada kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan melanggar hukum di ASEAN, menjadi penting untuk mempertimbangkan permasalahan terkait dengan praktik kerja yang eksploitatif. Pekerja perikanan migran terbilang rentan terhadap penganiayaan dan bahkan kerja paksa mengingat bentuk pekerjaannya yang jam dan masa kerjanya bersifat jauh dari rumah untuk jangka waktu panjang, kondisi kerja dan hidup yang keras serta sejumlah bahaya yang harus dihadapi. Pengawasan kondisi-kondisi kerja termasuk keselamatan dan kesehatan kerja di kapal serta penegakkan standar dan sanksi dapat memberikan perlindungan bagi pekerja di kapal ikan.

Karenanya, guna memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja perikanan migran, ILO, dengan dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, mengadakan Pertemuan Regional dua hari mengenai Panduan tentang Inspeksi Kondisi Kerja dan Kehidupan berdasarkan Bendera Negara di Kapal-kapal Ikan (*Guidelines on Flag State Inspection of Working and Living Conditions on Board Fishing Vessels*) pada 28–29 April 2015 di Jakarta. Lokakarya ini diselenggarakan ILO melalui Proyek Aksi Tripartit untuk Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (ASEAN TRIANGLE), yang didanai Pemerintah Kanada serta oleh Proyek GMS Triangle yang didukung oleh Australian Aid.

“Di bawah pemerintahan baru Presiden Joko Widodo, Indonesia kini memperkuat upayanya melindungi baik perairan maupun

Mempromosikan kondisi kerja dan kehidupan yang lebih baik bagi pekerja perikanan di kawasan ASEAN

pekerjanya baik di kapal-kapal ikan nasional maupun internasional. Sebagai negara maritim, kami sangat mendukung prakarsa-prakarsa untuk memperkuat kerjasama bilateral dan regional, khususnya di antara negara-negara ASEAN, agar secara efektif dapat menjalankan yuridiksi kami dan mengontrol kapal-kapal yang melewati perairan kami berdasarkan bendera negara melalui pembentukan sistem bersama,” ujar M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan, mengomentari pentingnya pelaksanaan pertemuan ini untuk Indonesia.

Selama lokakarya, perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha dari delapan negara (Indonesia, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) memperkuat pemahaman mereka dan kerjasama regional di bidang perikanan.

Lokakarya pun memberikan sarana bagi para peserta untuk mengkaji kebijakan nasional dan kerangka peraturan perundangan mengenai pekerjaan di bidang perikanan dan berbagi informasi mengenai rancangan Panduan Inspeksi Negara terhadap Kondisi Kerja dan Kehidupan berdasarkan Bendera Negara di Kapal-Kapal Ikan. Selanjutnya, tindak lanjut konkrit akan diidentifikasi untuk kerjasama di tingkat nasional, bilateral dan regional guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja perikanan migran.

Pekerja perikanan migran terbilang rentan terhadap penganiayaan dan bahkan kerja paksa mengingat bentuk pekerjaannya yang jam dan masa kerjanya bersifat jauh dari rumah untuk jangka waktu panjang, kondisi kerja dan hidup yang keras serta sejumlah bahaya yang harus dihadapi. Pengawasan kondisi-kondisi kerja termasuk keselamatan dan kesehatan kerja di kapal serta penegakkan standar dan sanksi dapat memberikan perlindungan bagi pekerja di kapal ikan

“Kami ingin mengurangi eksploitasi pekerja perikanan migran di kawasan ini melalui peningkatan kontrol negara terhadap kondisi kerja dan kehidupan di kapal-kapal ikan. ILO akan berkomitmen memastikan pelaksanaan Konvensi ILO No. 188 mengenai Pekerjaan di Sektor Perikanan,” kata said Manuel Imson, Staf Senior/Koordinator Proyek untuk proyek ASEAN TRIANGLE.

Konvensi ILO mengenai Pekerjaan di sektor Perikanan (No. 188) diadopsi pada 2007, mencakup berbagai permasalahan di industri perikanan. Permasalahan ini mencakup usia minimum bekerja, standar minimum untuk perjanjian kerja (misalnya masa pengupahan, tahapan pengupahan, cuti tahunan, dan pemutusan kerja), masa istirahat, standar kondisi kerja dan makanan, K3 dan perawatan medis dasar, jaminan sosial dan sebagainya)

Pertemuan ini merupakan Pertemuan Regional kedua mengenai pekerja perikanan migran, menindaklanjuti lokakarya sebelumnya di Makassar, Indonesia, pada September 2013 bertajuk “Pertemuan Regional Pekerjaan Perikanan: Meningkatkan Basis Pengetahuan dan Berbagi Praktik Terbaik untuk Perlindungan Pekerja Migran. Lokakarya pertama membahas

mengenai standar-standar internasional mengenai pekerjaan perikanan, berbagi kebijakan nasional dan kerangka peraturan perundangan, dan berbagi pengalaman mengenai perlindungan pekerja perikanan migran di kawasan ini dan di seluruh dunia. ❖



Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripatisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diurusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.

MAMPU – Akses atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Perempuan

Didukung oleh:



Australian
Aid

MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan



Sekilas:

Proyek ILO-MAMPU berupaya menyediakan pekerjaan layak bagi perempuan yang terbelang rentan di pasar kerja, terutama perempuan yang terlibat dalam pekerjaan rumahan, termasuk penyandang disabilitas. Ini merupakan bagian dari Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) yang dipelopori Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di Indonesia.

Pekerja rumahan, di Indonesia kerap dianggap sebagai pekerja yang “berada di luar sistem kerja” (*putting-out system*), merupakan pekerja yang bekerja di rumah atau lokasi lain di luar tempat kerja pengusaha untuk memperoleh upah dengan membuat produk yang ditentukan pengusaha. Karena mereka bekerja secara terisolir dengan pengaturan kerja secara informal, posisi mereka kurang diakui, tidak terwakili dan tidak memiliki suara, serta memiliki kekuatan berunding yang lemah kendati mereka harus bekerja selama berjam-jam untuk memperoleh upah kecil, bahkan biasanya dalam kondisi yang tidak aman dan kurang sehat serta rentan dieksploitasi.

Proyek ILO-MAMPU berakhir pada Desember 2015.

Capaian Tahun 2015:

Capaian Umum:

Mengidentifikasi dan memberdayakan pekerja rumahan perempuan

1. **Mengidentifikasi dan melatih setidaknya 1.540 pekerja rumahan (1.453 perempuan dan 87 laki-laki) dan membentuk 33 kelompok pekerja rumahan** di 13 kabupaten di empat provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur) oleh para mitra organisasi masyarakat madani proyek ini. Topik pelatihan mencakup advokasi, pengorganisasian, kesadaran hukum, kepemimpinan, gender, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pendidikan keuangan.
2. **Pengumpulan data awal pekerja rumahan perempuan yang menjadi sasaran.**
3. **Penyuluhan kepada pekerja rumahan yang diprakarsai oleh para mitra serikat pekerja di sektor mereka.** Serikat pekerja yang berpartisipasi: FSB Kamiparho-KSBSI, FSB Garteks-KSBSI, FSP RTMM-KSPSI Rekonsiliasi, FSP TSK-KSPSI Rekonsiliasi, FSP TSK-KSPSI Kongres Jakarta, dan KSPI.

Peningkatan kesadaran mengenai kerja rumahan

1. **Penyusunan dan penerbitan publikasi mengenai Konvensi dan Rekomendasi ILO tentang Pekerjaan Rumahan** dalam bahasa Inggris dan Indonesia: Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 tentang Pekerja Rumahan/Rekomendasi ILO No. 184 Tahun 1996 tentang Pekerjaan Rumahan.
2. **Peningkatan kesadaran mengenai pekerja rumahan** di kalangan pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan lembaga masyarakat madani yang mendukung pekerja

rumahan melalui lokakarya di tingkat nasional maupun provinsi (Jawa Timur dan Sumatera Utara).

3. **Pengembangan dan penyebaran materi kampanye mengenai pekerjaan layak untuk pekerja rumahan** dalam bentuk poster, kartu pos, ringkasan proyek, baju, topi, gelang, tas, buku cerita dan cerita bergambar kepada para konstituen tripartit, mitra proyek dan pemangku kepentingan lain selama lokakarya dan kegiatan umum.

Memperkuat kapasitas pemangku kepentingan utama dalam membantu pekerja rumahan perempuan dan penyandang disabilitas perempuan yang melakukan pekerjaan rumahan memperoleh pekerjaan layak

1. **Peningkatan kapasitas dan pengetahuan serikat pekerja dan mitra masyarakat**, agar mereka dapat mendukung layanan kesetaraan gender, kesadaran hukum, pengorganisasian, advokasi, pendidikan keuangan dan K3 kepada pekerja rumahan, melalui pelatihan untuk pelatih, studi tur ke Self-Employed Women's Association (SEWA) di India, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan berbagai pengetahuan.
2. **Berbagi pengetahuan dan pembentukan jejaring antara para pemimpin pekerja rumahan, staf serikat pekerja serta lembaga masyarakat madani dengan kelompok pekerja rumahan dan perekonomian informal di tingkat regional dan global** melalui:
 - Lokakarya Sub-Regional Homenet South-East Asia di Bangkok, Thailand.
 - Kegiatan Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), sebuah jaringan global perempuan di sektor perekonomian informal, di Yogyakarta, Indonesia.

3. **Penguatan kapasitas mitra proyek tentang pengelolaan proyek** (laporan teknis dan keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan survei/pangkalan data).

4. **Pengembangan berbagai materi pelatihan, termasuk materi K3 bagi pekerja rumahan**, kesetaraan gender, advokasi, kesadaran hukum, pengorganisasian, pendidikan keuangan, kepemimpinan, dan manual pelatihan pengasuhan anak berbasis masyarakat.

5. **Memasukkan persoalan pekerjaan rumah dalam forum-forum dialog sosial** yang dihadiri oleh para konstituen tripartit di Jawa Tmur dan Sumatera Utara.

Penciptaan basis pengetahuan untuk meningkatkan kondisi kerja pekerja rumahan perempuan dan penyandang disabilitas perempuan yang melakukan pekerjaan rumahan melalui publikasi dan penyebaran studi dan survei berikut ini:

- Pekerja rumahan di Indonesia: hasil dari penelitian pemetaan pekerja rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.
- Hubungan kerja dan kondisi kerja di sebuah rantai pasokan rotan IKEA.
- Penelitian tentang praktik pengusaha dalam mempekerjakan pekerja rumahan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- Pekerja rumahan dan Perantara – Temuan Survei.
- Pekerja Rumahan dan Perusahaan – Temuan Survei.
- *Empowering women homeworkers from invisibility to leaders: Experiences, good practices and lessons from North Sumatera in promoting decent work for homeworkers.*
- Rekomendasi untuk mempromosikan kerja layak bagi pekerja berbasis rumahan.



Kisah Ida Fitriany: “Saya ingin pekerja rumahan diakui sebagai pekerja”

IDA FITRIANY belajar banyak mengenai persoalan-persoalan pekerja rumahan sejak bergabung dengan program Yasanti di bawah Proyek ILO mengenai Akses atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Perempuan (MAMPU) yang didanai oleh Pemerintah Australia. Sekarang ia menyadari bahwa pekerja rumahan adalah pekerja dan memiliki hak-hak kerja seperti halnya pekerja lain dan ia ingin terus menyuarkan hak-hak tersebut.

Ida, 47 tahun, tinggal di sebuah desa di Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan suami dan dua orang anak berusia 12 (anak perempuan) dan 15 tahun (anak laki-laki). Suaminya yang sudah menikah Ida selama 17 tahun adalah seorang pekerja musiman untuk penyelenggaraan acara. Ia pekerja lepasan yang baru bekerja jika dipanggil oleh penyelenggara acara. Ida pun menerima beberapa ratus ribu rupiah dari sang suami saat menerima pembayaran. Namun, ia sendiri tidak pernah mengetahui seberapa besar suaminya dibayar dan tidak pernah bertanya.

Ida bekerja sebagai pekerja rumahan sejak awal tahun 2000. Tugasnya memotong dan membersihkan benang-benang yang tertuntai atau berantakan dari pakaian jadi dan dibayar dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu Rp. 80 (USD 0.006 sen) per potong. Ia menerima pesanan kerja berdasarkan paket, tiap paket terdiri dari



“ Saya ingin pekerja rumahan diakui sebagai pekerja. Kami ingin hak-hak kami sebagai pekerja diakui dan saya ingin kontrak tertulis di antara kami dan para pemberi kerja ”

Ida Fitriany
Pekerja rumahan

10 pakaian. Ia bisa menyelesaikan 10 paket (100 potong pakaian) per hari, yang artinya menerima Rp. 8.000 (USD 0.67) per hari.

Apabila ia bekerja penuh 30 hari per bulan, ia dapat memperoleh Rp. 240.000 (USD 20) pada akhir bulan. Jika tidak, Ida memperoleh penghasilan lebih kecil. Selain itu, pekerjaan rumahan ini hanya datang pada bulan Desember dan Mei tahun berikutnya—periode di mana banyak perusahaan garmen mengeksport produk-produknya.

Ida menerima pesanan kerja, mengambil pakaian dan memberikan hasil kerjanya melalui seorang perempuan perantara yang tinggal di dekat rumahnya. Ia juga mengetahui nama perusahaan tempat ia bekerja, namun menolak menuliskan nama perusahaan tersebut karena takut kehilangan pekerjaannya.

Untuk menambah penghasilan keluarganya, Ida membuka sebuah warung di rumah yang sebagian besar menjual bahan-bahan pangan. Warung tersebut tadinya menghasilkan Rp. 300,000 per hari saat

belum banyak warung-warung lain di lingkungannya. Saat ini warung tersebut hanya menghasilkan Rp. 100,000 per hari. Ida juga menjual pakaian yang dibeli dari tempat lain dan dia memperbolehkan pelanggan membayarnya dengan cicilan. Penghasilannya beragam, bergantung pada apakah pelanggan membayar cicilannya tepat waktu atau tidak.

Dengan semua pekerjaan dan pekerjaan suaminya, ia tahu bahwa penghasilan keluarganya di atas upah minimum daerah. Namun Ida tidak berpartisipasi dalam program jaminan sosial pemerintah, seperti BPJS, karena tidak mengetahui bagaimana mengakses program tersebut. Ia juga mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dengan uang sekolah yang dibayarkan oleh pemerintah. Ini membantu keluarganya memiliki cukup uang untuk makan dan menabung sehingga anak-anaknya dapat mengakses pendidikan tinggi di masa mendatang.

Teman-temannya sesama pekerja rumahan menganggap Ida sebagai seorang pengusaha kecil yang sukses dan karenanya, mempercayai Ida menjadi pemimpin kelompok mereka, "Perempuan Mandiri". Kelompok ini memiliki 32 anggota dan telah terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan sejak tahun 2010, difasilitasi oleh Yasanti. Yasanti adalah sebuah LSM lokal yang bekerja di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah dan sejak 2014 telah menjadi salah satu mitra pelaksana proyek ILO-MAMPU.

"Saya telah berpartisipasi dalam pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan gender dan terlibat dalam pengembangan modul-modul pendidikan untuk pekerja rumahan. Saya juga berpartisipasi dalam pertemuan bulanan, di mana kami berbicara mengenai persoalan-persoalan sebagai pekerja rumahan dan berusaha menemukan solusi-solusi," ujar Ida.

Ida lebih lanjut menyatakan bahwa ia telah belajar banyak mengenai persoalan-persoalan pekerja rumahan melalui Yasanti. Dengan sedikit keraguan terbersit, ia berkata, "Saya ingin pekerja rumahan diakui sebagai pekerja. Kami ingin hak-hak kami sebagai pekerja diakui dan saya ingin kontrak tertulis di antara kami dan para pemberi kerja."

Ketika ditanya mengapa ia ragu-ragu, Ida menjelaskan bahwa ia takut para pemberi kerjanya akan berhenti memberikan pekerjaan apabila mereka terlalu vokal. Namun ketika ditanya apakah ia akan terus memperjuangkan persoalan-persoalan pekerja rumahan, ia dengan tegas mengatakan, "Oh, tentu saja." Kita membutuhkan lebih banyak perempuan pemberani seperti Ida dan kita perlu menyuarkan hak-hak mereka sebagai seorang pekerja rumahan. ❖



Publikasi



Hubungan kerja dan kondisi kerja di sebuah rantai pasokan rotan IKEA

ISBN: 9789221302599

Penelitian ini menyajikan temuan pada kondisi kerja pekerja rumahan yang bergerak di tingkatan terendah dari rantai pasokan IKEA rotan, dan menyajikan rekomendasi untuk memperkuat kepatuhan standar tenaga kerja dalam rantai pasokan sehingga dapat menguntungkan baik pekerja dan bisnis..



Pekerja berbasis rumahan: Kerja layak dan perlindungan sosial melalui organisasi dan pemberdayaan: Pengalaman, praktik baik dan pelajaran dari pekerja berbasis rumahan dan organisasi mereka

ISBN: 9789228304350

Laporan ini menyajikan pengalaman, praktik yang baik dan pelajaran dalam memberdayakan pekerja rumahan dan mempromosikan pekerjaan yang layak berdasarkan hasil penelaahan terhadap strategi yang digunakan oleh organisasi dukungan di Chile, India, Filipina dan Thailand selama 30 sampai 40 tahun terakhir. Berbagi pengetahuan dan pengalaman organisasi pekerja rumahan dalam membuat pekerjaan berbasis rumah terlihat, mengorganisir dan mewakili anggota mereka, dan meningkatkan kerja mereka dan kondisi hidup yang luas.



Pengasuhan anak berbasis masyarakat: manual pelatihan

ISBN: 9789228302578

Manual ini merupakan alat pelatihan dan panduan referensi teknis untuk mendukung pengembangan pusat penitipan anak berbasis masyarakat yang menawarkan kualitas tinggi dan anak terjangkau, dan memberikan kesempatan kerja yang layak bagi pemberi perawatan anak di masyarakat, baik itu perempuan atau laki laki, bekerja sebagai pengusaha atau kelompok bisnis.



Penelitian tentang praktik pengusaha dalam mempekerjakan pekerja rumahan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

Laporan ini menyajikan temuan dari penelitian serta rekomendasi untuk Apindo dan para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mempromosikan kerja layak bagi pekerja rumahan.



Pekerja rumahan di Indonesia: hasil dari penelitian pemetaan pekerja rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten

Penelitian ini menemukan bahwa pekerja rumahan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang sama yang lazim untuk pekerja rumahan di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di berbagai industri dan sektor melaksanakan berbagai jenis pekerjaan di rumah atau di rumah seorang teman.



Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2014 - 2015: Memperkuat daya saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak

ISBN: 9789228293685

Edisi ketujuh Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia yang diterbitkan Kantor ILO Jakarta ini difokuskan pada upaya untuk memperkuat daya saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak. Pekerjaan layak memainkan peran penting dalam memperkuat daya saing dan produktivitas suatu bangsa.



Pedoman untuk pengusaha: program pemagangan di Indonesia

ISBN: 9789228299021

Laporan ini menampilkan berbagai aspek dalam pemagangan seperti rekrutmen peserta pemagangan, program dan rentang waktu pemagangan, pelaksanaan pemagangan, sertifikasi, rekrutmen pekerja dari hasil pemagangan, dan sebagainya.



Panduan pekerja rumah tangga migran: buku saku*

ISBN: 9789228303742

Buku saku sebagai salah satu media untuk memberikan informasi yang mendalam tentang prosedur dan regulasi prapenempatan, penempatan, pasca-penempatan, peran serikat pekerja dalam perlindungan pekerja migran, manfaat berserikat, informasi penting tentang negara tujuan, termasuk informasi nomor kontak penting dan darurat.



Kode etik perlindungan pekerja rumah tangga dan penghapusan pekerja rumah tangga anak*

Kode etik ini menegaskan pentingnya pengawasan setelah penempatan. Kode etik mendesak semua anggota Asosiasi Penyalur Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) untuk bekerjasama mencegah anak-anak di bawah umur bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan bersama memastikan kondisi kerja yang layak melalui pemantauan rutin setelah penempatan.



Program ILO di Indonesia: Capaian 2014

ISBN: 9789220298145

Publikasi ini menyajikan capaian-capaian kegiatan ILO di Indonesia pada 2014. Capaian-capaian pada tahun 2014 didasarkan pada kemitraan dengan para konstituen, Pemerintah Indonesia, organisasi pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai perwakilan pengusaha.

Untuk mengunduh versi elektronik dari publikasi-publikasi ini, kunjungi Situs ILO Jakarta: www.ilo.org/jakarta

*Hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia

Kegiatan Utama

- Segmen Integrasi Dewan Ekonomi dan Sosial 2015 – “Mencapai pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja dan kerja layak untuk semua”: Konsultasi nasional Indonesia, Jakarta, 24-25 Februari
- Lokakarya mengenai Pemagangan Berkualitas dan Ketenagakerjaan Muda, Jakarta, 3-4 Maret
- Lokakarya Pelatihan Media mengenai Pelibatan Media bagi Organisasi Pekerja Rumah Tangga, Bogor, Jawa Barat, 28-29 April
- Pertemuan Regional Kedua mengenai Perlindungan Pekerja Perikanan Migran: Kajian ASEAN mengenai Panduan Inspeksi Kondisi Kerja dan Kehidupan Berdasarkan Bendera Negara di Kapal-kapal Ikan, Jakarta, 28-29 April
- Mewujudkan Agenda Migrasi yang Adil: Aliran kerja antara Asia dan Negara-negara Arab Bali, 6-7 Mei
- Anak-anak dalam Dialog Interaktif dan Seminar Konsultasi: Pendidikan untuk Semua, Jakarta, 11 Juni
- Peluncuran Video Diary dan Foto Cerita mengenai Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga Anak, “Teman Remaja Teman Setara: Sembilan Kisah Persahabatan Kami dengan Pekerja Rumah Tangga”, Jakarta dan Makassar, 12 dan 18 Juni
- Dialog Ketenagakerjaan Indonesia mengenai Upah Minimum dan Kebijakan Upah, Bandung, Jawa Barat, 30 Juni
- Peluncuran Tren Ketenagakerjaan dan Sosial 2014-2015: Memperkuat Daya Saing dan Produktivitas melalui Pekerjaan Layak, Jakarta, 9 Juli
- Lokakarya Tripartit mengenai Ketenagakerjaan, Dialog Sosial dan Hubungan Pekerja-Manajemen dalam Sektor Layanan Keuangan di Sejumlah Negara di Asia dan Pasifik, Jakarta, 5-6 Agustus
- Lokakarya Standar Ketenagakerjaan Internasional dan Kewajiban Pelaporan, Jakarta, 10-13 Agustus

■	Pertemuan mengenai Pekerjaan Perikanan, Bandung, Jawa Barat, 30 August – 2 September
■	Pendekatan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk Memerangi Kerja Paksa, Jakarta, 30 September – 2 Oktober
■	Dialog Eksekutif dengan Sektor Swasta mengenai Hak, Keberagaman dan Kesetaraan di Tempat Kerja, Jakarta, 27 Oktober
■	Lokakarya Binasional Rekrutmen dan Perlindungan Pekerja Domestik Migran di Koridor Indonesia-Malaysia, Jakarta, 3-4 November
■	Mengkaji Asuransi Kesehatan Nasional Indonesia, Jakarta, 9 November
■	Konferensi Pengawasan Ketenagakerjaan ASEAN ke-5: Meningkatkan Pengawasan ketenagakerjaan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi, Yogyakarta, 11-12 November
■	Seminar for Enhancing Social Protection in an Economically Integrated ASEAN, Jakarta, 25-27 November
■	Bisnis dan Disabilitas di Indonesia: Menjangkau Potensi Penyandang Disabilitas, Jakarta, 1 Desember
■	Seminar untuk Mempromosikan Kondisi Kerja yang Lebih Baik bagi Pekerja Rumahan, Jakarta, 15-16 December